

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
PT. AN-NUR MAARIF DI KAB. SIDRAP (Analisis Manajemen Syariah)**



2021

TESIS

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
PT. AN-NUR MAARIF DI KAB. SIDRAP (Analisis Manajemen Syariah)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil sebagai tahapan dalam
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah Pada Program
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

Oleh

KHAERUNNISA
NIM.18.0224.012

**FAKULTAS PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : KHAERUN NISA
Nim : 18.0224.012
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 10 Februari, 1995
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
Pada PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap
(Analisis Manajemen Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, yang dibuat orang lain, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Agustus 2021

Mahasiswa



KHAERUN NISA
18.0224.012

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul *"PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. AN-NUR MAARIF DI KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)"*, yang disusun oleh saudari **KHAERUNNISA**, NIM: 18.0224.012, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah pada hari **Kamis, 19 Agustus 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1443** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.



(.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

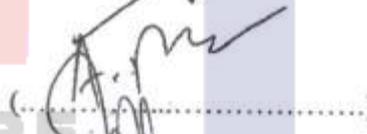
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M



(.....)

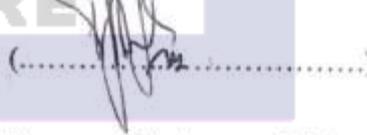
PENGUJI UTAMA:

Dr. H. Rahman Ambo Masse Lc, M.Ag.



(.....)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.



(.....)

Parepare, 20 Agustus 2021

Diketahui oleh
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP. 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah, nikmat iman, ilmu, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Parepare.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda tercinta H. Jufri dan Ibunda yang tersayang Hj. Sadaria, yang senantiasa menyayangi, mencintai, mengasihi serta tak pernah bosan mengirimkan do’a yang tulus buat penulis sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya serta kepada saudara saudariku kandungku Ummul Nisa, Irmayanti, Irnawati dan Muhammad Fahmi Huwaidi Jufri yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terimah kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag, selaku pembimbing Utama dan Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku Pembimbing Pendamping, Atas segala bimbingan, arahan, bantuan dan motivasinya yang tak bosan-bosanya memberikan bimbingan dan arahan serta kritik demi kelancaran dalam penyusunan tesis ini, dengan memberikan nasehat, motivasi, masukan dan saran kepada penulis.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare dalam setiap kebijakannya menjadikan IAIN Parepare lebih baik dan menjadi tempat menimba ilmu yang aman, nyaman, dan sangat menunjang studi penulis.
2. Dr. St. Jamilah Amin, M.Ag., Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Mahmud Saleh, M.Pd. yang masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur PPs IAIN Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
4. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag dan Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahap-tahap dalam memperoleh gelar magister.
5. Bapak H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H, selaku Direktur Utama PT. An-Maarif Kabupaten Sidrap serta, Jajaranya yang telah memberikan izin dan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
6. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.

7. Segenap pegawai administrasi PPs IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis mulai awal sampai penyelesaian studi magister.
8. Kepada kedua Ayah mertua dan Ibu mertua, terimah kasih atas Do'a dan bantuanya yang sangat berharga bagi penulis.
9. Suamiku tercinta Andi Kaharuddin, SKM dan Putriku Andi Nur Arisha telah meluangkan waktu yang banyak untuk memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat terbaikku Nurdiana T, yang telah membantu dan memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
11. Dan Kepada seluruh guru, teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi program magister pada pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 20 Agustus 2021

Penyusun,



KHAERUN NISA

NIM. 18.0224.012

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN... x	
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Yang Relevan	14
B. Landasan Teoritis	16
1. Teori Penerapan.....	16
2. Teori <i>Good Corporate Governance</i>	21
3. Teori Travel/Biro Haji.....	38
4. Teori Manajemen Syariah.....	46
C. Bagan Kerangka Teoretis Penelitian	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	57
B. Paradigma Penelitian	58
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	59
D. Sumber Data Penelitian.....	61

	E. Instrumen Penelitian	61
	F. Tahapan Pengumpulan Data	61
	G. Teknik Pengumpulan Data.....	64
	H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	68
	I. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	70
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
	A. Deskripsi Hasil Penelitian	73
	1. Penerapan <i>Good Corporate Governace</i> Pada PT An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap	76
	2. Evaluasi Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Analisis Manajemen Syariah Pada PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap.....	94
	B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	105
BAB V	PENUTUP	119
	A. Simpulan	119
	B. Implikasi	120
	C. Rekomendasi	120
	DAFTAR PUSTAKA	122
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
01	Nama Travel Di Kabupaten Sidrap	4
02	Indikator Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	26
03	Data Jamaah Umrah PT. An-Nur Maarif 2017	86
04	Data Jamaah Umrah PT. An-Nur Maarif 2018	87
05	Data Jamaah Umrah PT. An-Nur Maarif 2019	88
06	Data Jamaah Umrah PT. An-Nur Maarif 2020	90

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
01	Bagan Karangka Pikiri	68
02	Struktur Organisasi PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	š a	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ž al	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	š ad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž a	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥ ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍ ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fatḥ ah dan yā ' </i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fatḥ ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... ا ...	<i>Fatḥ ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> ’	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ’	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍ ammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī la*

يَمُوتُ : *yamū tu*

4. *Tā* ’*marbū ṭ ah*

Transliterasi untuk *tā* ’*marbū ṭ ah* ada dua, yaitu: *tā* ’*marbū ṭ ah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥ ah*, *kasrah*, dan *ḍ ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā* ’*marbū ṭ ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā* ’*marbū ṭ ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā* ’*marbū ṭ ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-aṭ ṭā l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madī nah al-fā ḍ ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥ ikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydī ḍ*)

Syaddah atau *tasydī ḍ* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydī ḍ* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

أَلْحَقَّ : *al-h aqq*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī* .

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilā du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murū na*

التَّوَعُّ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilā l al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilāh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ دِينُهُ *dīnillāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tāmarbūḥ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥ ammadun illā rasū l
Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnā si lallaḏ ī bi Bakkata mubā rakan
Syahru Ramaḏ ā n al-laḏ ī unzila fi h al-Qur‘ā n
 Naṣ ī r al-Dī n al-Ṭ ū sī
 Abū Naṣ r al-Farā bī
 Al-Gazā lī
 Al-Munqiḏ min al-Ḍ alā l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walī d Muḥ ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walī d Muḥ ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walī d Muḥ ammad Ibnu)
 Naṣ r Ḥ ā mid Abū Zaī d, ditulis menjadi: Abū Zaī d, Naṣ r Ḥ ā mid (bukan: Zaī d, Naṣ r Ḥ amī d Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥ ā nahū wa ta‘ā lā</i>
saw.	=	<i>ṣ allalā hu ‘alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ā li ‘Imrā n/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Khaerun Nisa
Nim : 18.0224.012
Judul Tesis : Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Syariah)

Penelitian ini membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governace* pada PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap, dan untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* dalam Analisis Manajemen Syariah pada PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap. Pada prinsipnya *Good Corporate Governance* merupakan sebuah tata kelola yang baik yang dimana bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggali informasi secara mendalam dengan melakukan metode wawancara secara langsung ke lapangan. Pendekatan penelitian adalah fenomenologis. Dan mengambil latar belakang PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada PT An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap sudah terlaksana, Namun ada indikator dari prinsip Transparansi yang belum sepenuhnya terlaksana yakni penyampaian kebijakan dalam hal perekrutan karyawan PT. An-Nur Maarif. Adapun komponen indikator prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu *Transparansi, Akuntabilitas, profesional, bertanggungjawab, dan kewajaran* sudah terlaksana dengan baik. Salah satu bukti dari terlaksananya prinsip *Good Corporate Governance* yaitu dalam hal menyampaikan informasi serta karyawan telah disiplin dan bertanggungjawab terhadap setiap tugas yang diteloh diberikan. hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* salah satunya adalah prinsip *Akuntability*. Penerapan *Good Corporate Governance* di PT. An-Nur Maarif ternyata sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam manajemen yaitu *Shidiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah*. Ke empat unsur ini merupakan bagian dari sistem Syariah yang dilaksanakan secara professional.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Manajemen Syariah*

ABSTRACT

Name : Khaerun Nisa
St's ID Number : 18.0224.012
Title : The Implementation of Good Corporate Governance at PT. An-Nur Maarif in Sidrap Regency (Sharia Management Analysis)

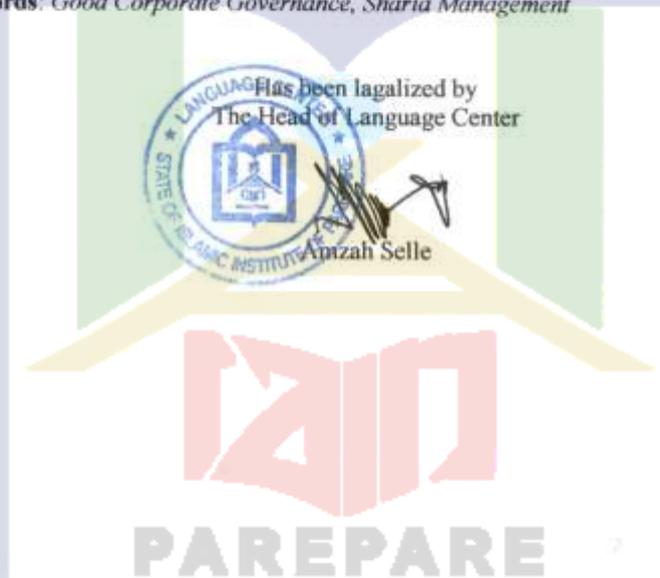
This study discussed the implementation of Good Corporate Governance at PT. An-Nur Maarif in Sidrap Regency. This study aimed to determine the application of the principles of Good Corporate Governance at PT. An-Nur Maarif Sidrap Regency, and to find out how to evaluate the implementation of Good Corporate Governance in Sharia Management Analysis at PT. An-Nur Maarif in Sidrap Regency. In principle, Good Corporate Governance was a good governance that aimed to improve company performance.

The type of research was descriptive qualitative research, namely digging in-depth information by conducting interviews directly to the field. The research approach was phenomenological. It take the background of PT. An-Nur Maarif, Sidrap Regency. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques included data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The technique for testing the validity of the data was using the triangulation technique.

The results of this study indicated that the implementation of Good Corporate Governance at PT An-Nur Maarif in Sidrap Regency had been implemented, but there were indicators of the principle of transparency that had not been fully implemented, namely the delivery of policies in terms of employee recruitment at PT. An-Nur Maarif. The other components of the indicators of Good Corporate Governance principles, namely transparency, accountability, professionalism, responsibility, and fairness were ones that have been implemented well. One proof of the implementation of the principles of Good Corporate Governance was in terms of

conveying information and employees had disciplined responsibility for each task that had been given. This was in line with what was expected in applying the principles of Good Corporate Governance, one of which was the principle of Accountability. Implementation of Good Corporate Governance at PT. An-Nur Maarif turned out to be in line with Islamic values in management, namely Shidiq, Tabligh, Amanah and Fathanah. These four elements were part of the Sharia system which was implemented in a professional manner.

Keywords: *Good Corporate Governance, Sharia Management*



تجريد البحث

الإسم : جبر النساء

رقم التسجيل : ٢١٠.٤٢٢٠.٨١

موضوع الرسالة : تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات لشركة ذات مسؤولية محدودة نور المعارف في ناحية سدراب (تحليل إدارة الشريعة)

يناقش هذا البحث حول تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات لشركة ذات مسؤولية محدودة. نور المعارف في ناحية سدراب. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تطبيق المبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات لشركة ذات مسؤولية محدودة نور المعارف في ناحية سدراب، ومعرفة كيفية التقييم تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات في تحليل الإدارة الشرعية على نور المعارف في ناحية سدراب. مبدئياً الحوكمة الرشيدة للشركات هي حوكمة رشيدة تهدف إلى تحسين أداء الشركة.

هذا النوع البحث هو بحث نوعي وصفي، أي حفر المعلومات المتعمقة من خلال إجراء مقابلات مباشرة في الميدان. نتج البحث هذا هو علم الظواهر. وأخذ الخلفية لشركة ذات مسؤولية محدودة نور المعارف في ناحية سدراب. تقنيات جمع البيانات هي المراقبة والمقابلات والتوثيق. تشمل تقنيات معالجة البيانات

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن الحوكمة الرشيدة للشركات على شركة ذات مسؤولية محدودة نور المعارف في ناحية سدراب قد فعلت. لكن هناك مؤشرات لمبدأ الشافية لم يتم تنفيذها بالكامل، وهي تقديم السياسات المتعلقة بتعيين الموظفين لشركة ذات مسؤولية

محدودة نور المعارف. تم تنفيذ المكونات الأخرى لمؤشرات مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات، وهي الشفافية والمساءلة والمهنية والمسؤولية والإنصاف بشكل جيد. أحد الأدلة على تنفيذ مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات هو نقل المعلومات والموظفون منضبطون ومسؤولون عن كل مهمة تم تكليفهم بها. وهذا يتماشى مع ما هو متوقع في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات، والتي من بينها مبدأ المساءلة. تطبيق الحوكمة الرشيدة للشركات في الشركة ذات مسؤولية محدودة نور المعارف اتضح أنها تتماشى مع القيم الإسلامية في إدارة وية صديق، والتبليغ، والأمانة، وفتحونة. هذه العناصر الأربعة هي جزء من نظام الشريعة الذي يتم تنفيذه باحتراف.

الكلمات الرئيسية : الحوكمة الرشيدة للشركات إدارة الشريعة.

إتفق عليها:

رئيس مركز اللغة



Amzah Selle

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Corporate Governance lazim dikenal dengan sebutan tata kelola yang baik pada perusahaan, dimana telah menjadi perbincangan di seluruh Indonesia. Keburukan tata kelola pemerintah dan perusahaan di Indonesia pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997. Sehingga membuat perekonomian Indonesia menjadi terburuk. Semenjak itulah, semua pihak setuju untuk dapat bangkit dari keterburukan Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai cara untuk memperbaiki tata kelola yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada seluruh lini masyarakat.¹

Pada saat masa sekarang ini dimana persaingan didalam bisnis semakin ketat. Banyaknya muncul perusahaan-perusahaan yang baru. Serta semakin banyaknya penyedia produk dan jasa, sehingga konsumen lebih bebas untuk menentukan pilihannya. Karna semua orang pasti menginginkan sebuah produk yang berkualitas, diberikan pelayanan yang baik dan cepat, dan memilih perusahaan yang manajemennya baik sebagainya. Hal tersebut pelaku bisnis dituntut untuk memberikan yang terbaik terhadap konsumennya.

Dengan melihat dalam situasi *hyper competition* (kondisi persaingan yang semakin dinamis), seperti sekarang ini keunggulan bersaing perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan *superior value* (melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan perusahaan lain) yang lebih tinggi

¹ M. Wahyudin Zakarsyi, *Good Corporate Governance, Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.1.

dibandingkan pesaingnya.² Maka untuk dapat unggul dalam persaingan bisnis, perusahaan harus menciptakan manajemen perusahaan yang kompetif dan terorganisir. Setiap aspek yang mendukung hal tersebut harus diikuti dengan pengendalian dan pengelolaan perusahaan yang baik. Sehingga konsumen dapat memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya misalnya kecurangan atau kebohongan dalam menyampaikan informasi. Salah satu pengendalian yang digunakan untuk mendukung hal tersebut adalah penerapan *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Adapun dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktu, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.³

Terdapat lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* yaitu *transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran*.⁴ Dari setiap komponen tersebut secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan perusahaan tidak menggambarkan nilai fundamental.

Salah satunya yaitu PT. An-Nur Maarif memiliki kewajiban untuk menerapkan *Good Corporate Governance* sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan

² Elly Halimatusadiah dan Bangun Gunawan, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No.1 2014, h. 300.

³ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, h. 34.

⁴ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, h. 35.

Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN. Perusahaan menyadari bahwa penerapan *Good Corporate Governance* saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.

Sehubungan dengan itu maka travel An-Nur Maarif merupakan salah satu dari sekian perusahaan yang bergerak memasarkan jasa dalam bidang perjalanan haji dan umrah yang telah memiliki izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap untuk melakukan bimbingan terhadap calon jamaah haji dan umrah. Dimana dalam Agama Islam ibadah haji dipandang sebagai ibadah yang penting. Salah satu bentuk urgensi ibadah haji adalah penegasan Nabi swt, bahwasanya haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Sidrap terdapat beberapa travel namun yang resmi dan lebih banyak digunakan oleh masyarakat Sidrap diantaranya PT. An-Nur Maarif, As-shafaa dan PT. Al- Marhamah cahaya utama dan PT An-Naba. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah nama-nama Travel yang ada di kabupaten Sidrap.

⁵ Direktur Jendral, *Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Buku pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji* Jakarta 2012, h. 2.

Tabel 01: Nama Travel Di Kabupaten Sidrap

No	Nama	Alamat
1	PT. An-nur Maarif	JL. Gangawa No. 7B Sidrap
2	As-Shafaa	Kadidi, JL. Poros Rappang No. B4. Pangkajenne Sidrap Sulawesi Selatan
3	AL- Marhamah Cahaya Utama	Baranti, RT. 001/003 Kel. Baranti, Kec. Baranti, Kab.Sidrap, Sulawesi Selatan
4	PT. An Naba Internasional Cabang Sidrap	Kadidi JL. Poros Rappan No. 134 Pangkajenne Sidrap Sulawesi
5	Al Ifadah	JL. Poros Sidrap- Soppeng
6	DH Tour (Daehatur Express Travel)	JL. Nene Mallomo No. 21 Pangkajenne kecamatan Maritenggae Sidrap
7	PT. Saudi Patria Wisata Tour & Travel Haji dan Umroh	JL. Andi Solopuli No 27 Rappang

Jumlah jasa biro perjalanan haji dan umrah di Kabupaten Sidrap yang melayani masyarakat banyak, serta keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah semakin bertambah dan dengan melihat keadaan yang sering terjadi disebuah usaha travel, dimana pihak perusahaan menggunakan dana jamaah untuk kepentingan pribadinya seperti halnya kasus dimana biro-biro perjalanan tega menipu konsumennya.

Banyaknya jumlah usaha travel di Kabupaten Sidrap tidak menjamin masyarakat memilih travel di Sidrap untuk menunaikan haji. Beberapa calon

jamaah haji mengaku lebih memilih mendaftar haji di kelompok haji di luar daerah, seperti memilih mendaftar haji di Travel daerah Palu dll. Hal ini disebabkan oleh lamanya calon jamaah haji di Sidrap dalam mengantri untuk menunaikan haji sedangkan calon jamaah mengkhawatirkan usianya sehingga memilih Travel di luar daerah daripada travel di Sidrap.

Beberapa kasus lain yang terjadi mengenai haji dan umrah yang menyebabkan Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* dalam usaha travel di Kabupaten Sidrap sangat penting untuk dilakukan karena beberapa kasus haji/umrah yang terjadi di sekitar masyarakat. Seperti halnya adanya kasus pembatalan pemberangkatan yang sepihak dari travel, jadwal pemberangkatan yang tidak jelas oleh travel, adanya kasus dana nasabah yang hilang atau digelapkan oleh travel serta daftar tunggu pemberangkatan yang tidak jelas dari travel haji/umrah.

Pentingnya penelitian *Good Corporate Governance* dalam usaha travel di Kabupaten Sidrap disebabkan juga adanya pandemic *Covid-19*. Dimana dalam kondisi pandemi *Covid-19* ini tidak ada pemberangkatan jamaah haji selama setahun terakhir ini. Hal ini menyebabkan beberapa calon jamaah haji merasa was-was terhadap pembatalan keberangkatan haji tersebut. Keadaan seperti ini yang menyebabkan peneliti ingin mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam biro perjalanan Haji dan umrah tersebut di masa pandemi ini. Bagaimana cara meningkatkan manajemen pelayanan agar calon jamaah haji tetap mau memakai jasa travel hajinya dalam menunaikan ibadah haji.

Apabila memilih jasa biro perjalanan haji dan umrah atau travel, pastikan bahwa biro yang dipilih merupakan yang terbaik, sebab seiring dengan semakin menjamunya usaha travel, timbullah persaingan yang begitu ketat sehingga besar

tantangan yang dihadapi penyelenggara haji dan umrah untuk lebih meningkatkan kualitas dalam segala hal, guna menarik masyarakat agar dapat menggunakan jasanya dengan berbagai cara mulai dengan memberikan berbagai sarana, fasilitas, harga yang bersaing, pelayanan yang memadai serta didukung dengan berbagai promosi yang sehat.

Pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan kepada jamaah yaitu dengan memiliki karyawan yang professional, tersedia sarana dan prasarana yang baik, tersedia semua produk yang diinginkan, serta bertanggungjawab kepada seluruh jamaah dari awal pendaftaran hingga selesai, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi secara jelas dan memiliki pengetahuan umum lainnya, mampu memberikan kepercayaan kepada jamaah.⁶ Untuk itu, pemberian pelayanan atau jasa yang baik akan memberikan kepuasan para jamaahnya yang pada akhirnya Akan menciptakan loyalitas jamaah pada pengelola (*travel*) yang bersangkutan. Bila pelayanan jasa dipersepsikan baik dan memuaskan, dan sebaliknya jika pelayanan atau jasa yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas di persepsikan buruk atau kurang baik.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menggali secara mendalam tentang tata kelola usaha travel di Kabupaten Sidrap khususnya di PT An-Nur Maarif, Oleh karena itu peneliti mengangkat sebuah judul yaitu Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Syariah). Penelitian ini Akan melihat bagaimana penerapan *Good Corporate Govenance* yang dilakukan oleh PT. An-Nur Maarif dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada jamaah untuk memenuhi harapan yang sesuai dengan harapan pelanggan.

⁶ Kasmir, *Etika Costumer Service*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 9.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Penelitian ini terfokus pada bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap, dan menjelaskan Bagaimana evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* dalam analisis manajemen syariah terhadap PT. An-Nur Maarif di kabupaten Sidrap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Analisis Manajemen Syariah Pada PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. An-Nur Maarif, Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* dalam Analisis Manajemen Syariah terhadap PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap.

2. Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

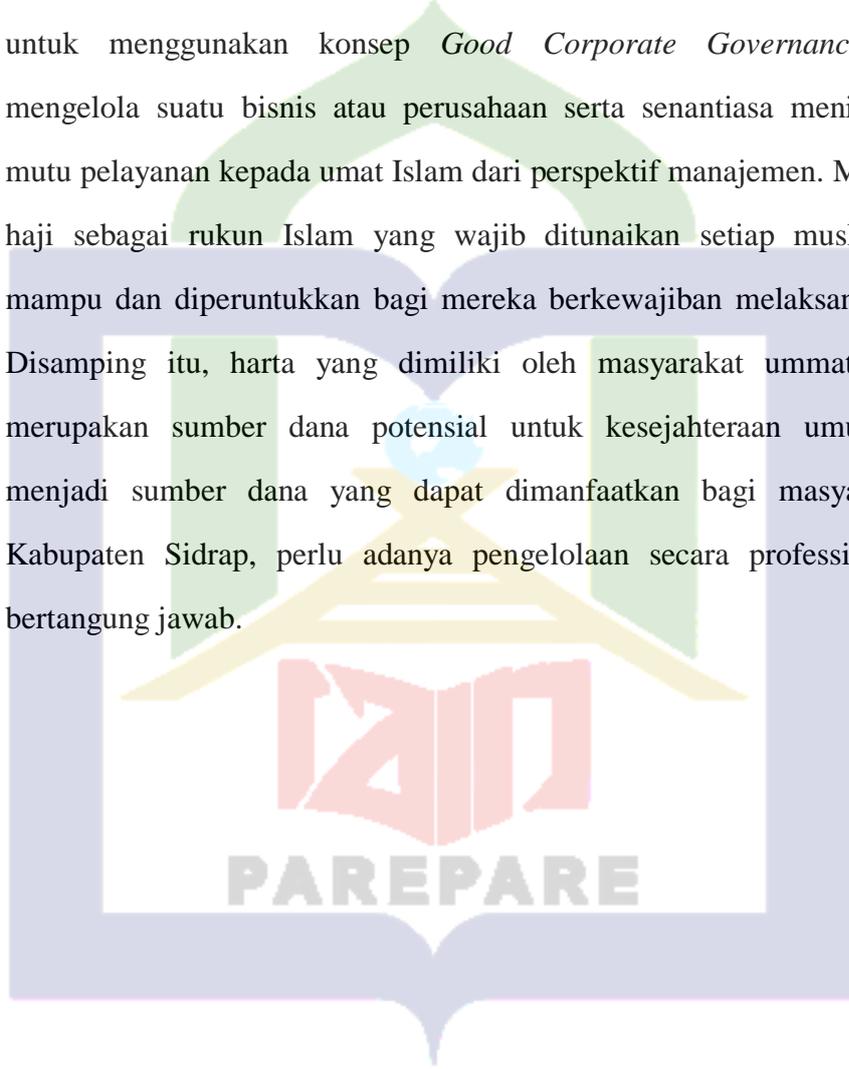
a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, bagi perkembangan teori tentang penerapan *Good*

Corporate Governance dan Analisis Manajemen Syariah PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap.

b. Secara praktis

Memberikan masukan bagi para perusahaan travel di Kabupaten Sidrap, untuk menggunakan konsep *Good Corporate Governance* dalam mengelola suatu bisnis atau perusahaan serta senantiasa meningkatkan mutu pelayanan kepada umat Islam dari perspektif manajemen. Mengingat haji sebagai rukun Islam yang wajib ditunaikan setiap muslim yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka berkewajiban melaksanakannya. Disamping itu, harta yang dimiliki oleh masyarakat umat muslim merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umum, agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat di Kabupaten Sidrap, perlu adanya pengelolaan secara professional dan bertanggung jawab.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang relevan

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagai peneliti sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Penelitian dalam bentuk tesis S2 Magister Manajemen yang dilakukan oleh Daniel Nuri Satrio Waspodo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Mengenai evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT XYZ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata Cara kelola perusahaan yang telah dilakukan PT. XYZ, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. XYZ, sehingga dapat mengetahui penerapan tata kelola perusahaan yang belum berjalan maksimal. Hasil dari penelitian ini adalah penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. XYZ serta evaluasi terhadap aspek-aspek dari tata kelola perusahaan belum dijalankan dengan maksimal.⁷

Persamaan penelitian yang ditulis Daniel Nuri Satrio Waspodo sama-sama membahas penerapan *Good Corporate Governance*. Perbedaanya adalah peneliti yang ditulis oleh Daniel Nuri Satrio Waspodo membahas mengenai evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* sedangkan tesis yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam analisis manajemen Syariah.

⁷ Daniel Nuri Santrio, *Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT XYZ*, Tesis S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2016.

2. Penelitian dalam bentuk tesis S2 Magister Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Dila Fadilathun Nisa, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengenai Pengaruh Peran Komite Audit, Audit Internal, serta Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Good Corporate Governance* Dan Kinerja Bank Syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite audit, audit internal, serta dewan pegawai syariah terhadap *Good Corporate Governance* dalam kinerja Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan internal audit berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, sedangkan dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Dalam komite audit dan dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Good Corporate Governance* sedangkan internal audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.⁸

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Dila Fadilathun Nisa adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Dila Fadilathun Nisa membahas mengenai pengaruh peran komite audit, audit internal, serta dewan pegawai syariah terhadap *Good Corporate Governance* dalam kinerja Bank Syariah, sedangkan tesis yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam Analisis Manajemen Syariah.

⁸ Dila Fadillathun, *Pengaruh Peran Komite Audit, Audit Internal, serta Dewan Pengawas Syariah Terhadap Good Corporatate Governance Dan Kinerja Bank Syariah*, Tesis S2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

3. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Nila Umailatul Fitri mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Islam Negeri) dengan judul Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* di BMT-UGT sudah terlaksana menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip GCG dalam operasional Lembaga tersebut, sedangkan implementasi *Good Corporate Governance* pada BMT-UGT dalam ekonomi Islam telah menerapkan GCG dalam versi STAF (Shidiq, Tabliq, Amanah, Fathonah) keempat unsur merupakan prinsip islam yang mendukung terlaksananya GCG yang merupakan bagian dari sistem Syariah.⁹

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Nila Umailatul Fitri adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Nila Umailatul Fitri berfokus implementasi *Good Corporate Governance* dalam mengelola risiko menurut prespektif ekonomi Islam sedangkan tesis yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam analisis manajemen Syariah, kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian berbeda yaitu peneliti akan melakukan penelitian di PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap sedangkan Penelitian relevan melakukan penelitian di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu.

⁹ Nila Umailatul Fitri, Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Manajemen risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu, (skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Elly Halimatusadiah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung dengan judul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada PT Pos Indonesia (Persero)). Hasil penelitian bahwa dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT. POS INDONESIA (Persero) telah diterapkan secara memadai mengenai unsur-unsur *Good Corporate Governance* dalam hal ini karena telah mampu melaksanakan transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Dan kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh PT. POS INDONESIA (Persero) unqualified (wajar tanpa syarat).¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Elly Halimatusadiah fokus penelitiannya membahas Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi sedangkan tesis yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam Analisa Manajemen Syariah) kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian berbeda yaitu peneliti akan melakukan penelitian di PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap sedangkan Penelitian relevan melakukan penelitian di PT. Pos Indonesia (Persero).

5. Penelitian dalam bentuk jurnal Finsa Bagus Prastantio dan M. G. Wi Endang N. P. mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Analisis *Good Corporate Governance* Untuk

¹⁰ Elly Halimatusadiah dan Bangun Gunawan, *Analisa Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi* (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) *Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan*, 2 (1), 2014, h. 300-312.

Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang). Hasil dari analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan analisis rasio keuangan perusahaan menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan pada PT. Pelabuhan Indonesia II telah cukup baik dalam membantu peningkatan kinerja perusahaan.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Elly Halimatusadiah fokus penelitiannya membahas Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi sedangkan tesis yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam analisis manajemen Syariah), kemudian yang kedua adalah lokasi penelitian berbeda yaitu peneliti akan melakukan penelitian di PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap sedangkan Penelitian relevan melakukan penelitian di PT. Pelabuhan Indonesia.

Berdasarkan hasil pengungkapan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, satu sisi menunjukkan adanya saling terkait dan mendukung satu dengan lainnya. Misalnya adanya pemahaman mengenai penerapan *Good Corporate Governance* yang diterapkan secara konsisten, memiliki dampak yang baik buat perusahaan dan dapat dijadikan sebagai pendukung bagi perusahaan dalam menghadapi risiko-risiko operasionalnya. Selain itu dalam perspektif Islam penerapan *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan karena prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selaras dengan

¹¹ Finsa Bagus Prastantio, *Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)*, Jurnal Administrasi Bisnis 27 No. 2, 2015, h. 1.

ajaran Islam yang tidak hanya berorientasi profit tetapi menerapkan nilai-nilai Islam seperti nilai kesetaraan, tasamuh (*toleransi*), keadilan (*justice*), kemaslahatan, musyawarah (*syura*), kejujuran (*honesty*), objectif (*comprehensiveness*), tanggungjawab dan amanah dan orientasi masa depan akan mewujudkan terbentuknya pemerintah yang bersih dan baik (*good and clean governance*).

B. Referensi yang relevan

Adapun beberapa referensi yang relevan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Buku Syakkroza Akhmad, dengan judul *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*, yang dimana didalam salah satu bab menjelesakan secara terperinci mengenai ruang lingkup *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan beberapa pembahasan lainnya. yang menjadi salah satu referensi rujukan bagi peneliti.¹²
- 2) Buku Wahyudin Zarkasyi, dengan judul *Good Corporate Governance, Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lain*. yang dimana dalam buku ini juga membahas. Prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *transparansi, akuntabilitas, Responsibilitas, independensi dan kewajaran/keadilan* yang menjadi landasan pada semua

¹² Syakkroza Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008).

instansi pemerintah secara profesional yang menjadi bahan referensi bagi penelitian.¹³

- 3) Buku Rachman Usman, dengan judul *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, yang mana dalam pembahasan di dalam buku ini yang ada sub pembahasan secara terperinci mengenai Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Ekonomi Islam yang meliputi *shidiq, tabligh, amanah, fathanah* yang menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti.¹⁴
- 4) Buku Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, dengan judul *Manajemen Syariah dalam prakteknya* dalam buku ini yang sub pembahasannya tentang perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, struktur organisasi yang sesuai serta sistem yang baik yang bersumber dari Al Qur'an dan sunnah Rosul serta membahas soal system, sistem ini disusun agar perilaku-perilaku didalamnya berjalan dengan baik yang menjadi sumber referensi bagi peneliti.¹⁵
- 5) Buku Mahmud, dengan judul *Manajemen Haji Umrah, dan Wisata Religi*, buku ini membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen baik *planning, organizing, actuating, controlling, maupun evaluating*, untuk mencapai suatu tujuan sehingga terlaksana secara efektif dan efisien dalam buku ini menjadi salah satu sumber referensi bagi penelitian.¹⁶

¹³ Wahyudi Zakarsyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁵ Didin Hafidhuddin Dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah Dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

¹⁶ Mahmud, *Manajemen Haji Umrah, dan Wisata Religi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016).

C. Landasan Teoritis

a. Teori Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara atau sesuatu yang kongkrit.¹⁷ Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun secara kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁸ Jadi penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang diterapkan sebelumnya sesuai atau selaras agar tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana.

Adapun Menurut Usman, penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.¹⁹ Jadi, *Implementasi* bukan hanya sebagai aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk dapat mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Rian Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰ Menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Maka dari itu penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat diperaktekkan kedalam masyarakat.²¹ Jadi penerapan adalah suatu tindakan

¹⁷ Lexy J. Meloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Bandung: Remaja Rosdakarya Cet. 26, 2009), h. 93.

¹⁸ Nugroho J, Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 158.

¹⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implemetasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grafindo, 2002), h. 70.

²⁰ Rian Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.158

²¹ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63

yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok dengan tujuan untuk mencapai apa yang telah ditentukan.

Adapun Menurut Munir Yusuf (2010), “Implementasi (penerapan) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan”. Implementasi sebagai suatu proses penerapan ide, konsep dan kebijakan dalam suatu tindakan praktis akan menjadi aktual melalui proses pembelajaran. Menurut Mulyasa dalam Suwarno (2009), “Implementasi (penerapan) merupakan suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberi dampak baik perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap”.²²

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, penerapan (implementasi) adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, inovasi atau gagasan dan hal lain yang dilakukan secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang terencana dan tersusun sebelumnya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan;
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut;
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.²³

²² Sri Endang Rahayu dan Hastina Febriaty, “Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Pasar Valuta Asing Pada Mata Kuliah Ekonomi Internasional 2 (Studi Mahasiswa Semester 5 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UMSU),” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 17, no. 2 (2017), h. 96.

²³ Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 45.

Penjelasan dari unsur-unsur penerapan diatas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan untuk mendukung teroi penerapan yaitu:

1) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.²⁴ Jadi implementasi adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan didalam perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Samodra Wibawa dalam bukunya mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: (a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; (b) Derajat perubahan yang diinginkan; (c) Kedudukan

²⁴ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 93

pembuat kebijakan; (d) (Siapa) pelaksana program; dan (e) Sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: (a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; (b) Karakteristik lembaga dan penguasa; dan (c) Kepatuhan dan daya tanggap.²⁵

2) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).²⁶

3) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.²⁷

4) Teori George C. Edward

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mansyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

²⁵ Wibawa, Samodra dkk. *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 22-23.

²⁶ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)*, h. 94.

²⁷ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)*, h. 99.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²⁸

Edward III menambahkan proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga faktor penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu

²⁸ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)*, h. 90-92.

keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.²⁹

b. Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

1) Ruang Lingkup *Good Corporate Governance* (GCG)

Secara bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, *Good Corporate Governance* adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil

²⁹ Budi Winarno, *Kebijakan publik: teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2008), h. 175-177.

dalam rangka mencapai tujuan organisasi.³⁰ Jadi *Good Corporate Governance* adalah sebuah tata kelola yang baik, yang dimana dapat membantu perusahaan untuk lebih maju dan berkembang dengan menjalankan prinsip-prinsip yang ada pada *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara Tanggal 1 Agustus 2011, menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme yang berlandaskan undang-undang etika perusahaan.³¹ Sedangkan Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.³²

Menurut Sinambela *Good Governance* adalah suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem

³⁰ Syakkroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*, h. 48.

³¹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara*, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.

³² KNKG, Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia,” dalam *Republika*, 3 Desember 2012, h. 6.

pemerintahan.³³ Sedangkan *Good Governance* yang dikemukakan oleh Dwi Payana merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena di dalamnya terkandung makna etis.³⁴ Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Menurut Veitzal Rivai dan Rifki Ismal secara umum istilah *Governance* lebih ditunjukkan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, dimana lebih ditunjukkan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan semua stakeholder. *Good Corporate Governance* pada intinya menyangkut orang (moralitas), etika dalam kerja dan pinisp-prinsip kerja yang baik.³⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem atau sebuah peraturan yang dapat mengatur, mengelola dan mengawasi setiap hubungan antara para pengelola perusahaan dengan *stakeholders* lainnya yang terdapat didalam perusahaan.

Penerapan *Corporate Governance* memberikan empat manfaat yaitu: meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah diperolehnya dan pembiayaan yang lebih mudah, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan meningkatkan *shareholder's value*. *Good Corporate Governance* terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang berasal dari dalam perusahaan (*Corporate Governance* internal perusahaan), dan

³³Lijan P Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara 2006), h. 47.

³⁴Dwipayana, *Membangun Good Governance*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka 2003), h. 45.

³⁵ Vietzhal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank, Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas dan Profesioanl*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 519.

unsur yang berasal dari luar perusahaan (*Corporate Governance* eksternal perusahaan).³⁶

2) Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Untuk dapat mengembangkan perusahaan ke depannya, maka berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kinerja didalam perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Adapun prinsip *Corporate Governance* sebagai berikut:³⁷

a) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi diartikan untuk membangun kepercayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah sebagai pengelola dengan masyarakat ataupun stakeholder melalui ketersediaan informasi yang mudah untuk diakses, lengkap juga *up to date* selalu. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan organisasi, organisasi harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Jadi transparansi adalah keterbukaan dalam mengambil sebuah keputusan serta keterbukaan dalam memberikan sebuah informasi secara benar dan tepat mengenai hal-hal yang ada pada setiap perusahaan.

³⁶ *Forum for Corporate Governance in Indonesia, Tata Kelola Perusahaan* Jilid I. Edisis ke-3., (Jakarta: Seri Tata Kelola Perusahaan, 2001).

³⁷ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, h. 39.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam perusahaan harus mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan independent/wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholder lain. Jadi akuntabilitas merupakan sebuah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan harus mempertanggungjawabkan serta kejelasan fungsi yang ada pada setiap perusahaan.

c) Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibility pada dasarnya merupakan sebuah pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usahanya dalam jangka Panjang dan mendapatkan pengakuan *sebagai good corporate citizen*. Jadi pertanggungjawaban disini adalah dimana setiap perusahaan dalam mengelola suatu bisnis harus menaati peraturan yang ada serta bertanggungjawab terhadap semua lingkungan masyarakat agar perusahaan dapat dipercaya sepanjang masa.

d) Kemandirian (*Independency*)

Untuk terlaksananya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Jadi independency adalah suatu keadaan dimana pada perusahaan harus dikelola secara professional tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

e) Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Jadi disini perusahaan dituntut untuk berperilaku yang adil terhadap sesama karyawan maupun pada setiap stakeholder lainnya.³⁸

Dengan menerapkan konsep *Good Corporate Governance*, diharapkan tercipta citra lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa bisnis usaha travel PT. An-Nur Maarif dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara sehat kuat dan efisien. Dengan demikian, perlu adanya konsep *Good Corporate Governance*, yang disingkat (GCG) yang terdiri dari beberapa prinsip-prinsip dasar yaitu *transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa prinsip ini secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada perusahaan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan perusahaan tidak menggambarkan nilai fundamental. Sehingga dengan adanya penerapan Good Corporate Governance dapat menjadikan perusahaan sehat dan efisien.

3) Indikator Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Tabel:02

Indikator Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

No	Aspek Yang dinilai	Indikator
1.	Transparansi (<i>transparency</i>)	a. Kemudahan mengakses informasi b. ketersediaan informasi c. kerahasiaan organisasi

³⁸ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, h. 35.

		d. penyampaian kebijakan e. visi dan misi organisasi
2.	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	a. perincian tugas dan tanggung jawab b. kompetensi yang sesuai c. sistem pengendalian internal d. pengukuran kinerja e. pelaksanaan tugas sesuai pedoman
3.	Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	a. kepatuhan hukum b. tanggungjawab social c. prinsip ke hati-hatian
4.	Professional (<i>professional</i>)	a. pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggungjawab b. dominasi dan pengaruh
5.	Kewajaran (<i>fairness</i>)	a. kesempatan berpendapat b. kesetaraan kompensasi c. kesempatan karyawan

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya* (Bandung: Alfabeta 2008).

Setiap perusahaan diuntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) baik berbentuk kesejahteraan social bagi masyarakat dan didalam penerapan *Good Corporate Governance* dapat memberikan kontribusi dan strategis dalam meningkatkan kinerja perusahaan, menciptakan kinerja yang sehat, serta efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan mencegah korupsi maupun suap terhadap usaha biro perjalanan haji dan umrah. Hal ini akan

mengarah pada upaya pencapaian *profit* dan *sustainability* secara seimbang. Oleh karena itu untuk dapat tercapainya tujuan tersebut maka suatu perusahaan harus menerapkan indikator *Good Corporate Governance*.

4) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya *Good Corporate Governance* pada PT. An-Nur Maarif di Kab.Sidrap berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Menurut Rachmadi Usman, Prinsip syari'ah tersebut merupakan bagian dari sistem syari'ah. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu:³⁹

a) *Shidiq* (benar atau jujur)

Shidiq memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Jujur menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan, tanpa adanya beban diawal maupun di kemudian hari. Dengan kejujuran yang dilandasi sikap istiqamah, seseorang akan mampu melewati badai yang selalu menghadang gerak dan langkahnya. Keutamaan dan kemuliaan sifat benar itu diperkuat dan dijelaskan dalam firman Allah swt: S. Al-Ahzab: 22 yang berbunyi:⁴⁰

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ٢٢

³⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 214.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: PT Sinar Pustaka Indonesia, 2012), h. 595.

Terjemahannya”

“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan”.

Dengan sifat tersebut diatas Nabi Muhammad saw menjadi seorang pemimpin kepercayaan bagi orang-orang yang hidup semasanya. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan.

b) *Tabligh*. (Komunikasi, Keterbukaan)

Tabligh secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari'ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa. *Tabligh* merupakan sifat rasul yang cara dan metodenya agar dapat dicontoh seperti dalam sifat rasul yang tidak menyembunyikan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan Agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Beliau sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan diraih oleh pengikutnya di kemudian hari.

c) *Amanah* (Tanggungjawab, kepercayaan)

Amanah menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*), sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar

al-Amin (yang dapat dipercaya). Yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah saw. Meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama. Sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 72, bunyinya:⁴¹

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.

Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt., walau sekecil apapun amanat itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad saw. Memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan.

d) *Fathanah* (kecerdikan dan kebijaksanaan)

Fathanah memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*). Dimana, *fathanah* merupakan sifat Rasul yang akalannya panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang diajarkan dan dipraktikan Nabi Muhammad SAW tersebut sangat identik dengan spirit *Good Corporate*

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 604.

Governance yang dikembangkan saat ini. Dalam ajaran Islam, point-point tersebut menjadi prinsip penting dalam aktifitas dan kehidupan seorang Muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip: (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah dan islah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran (*Good Corporate Governance*) yang menjadi acuan tata kelola organisasi yang lebih baik di dunia.⁴²

Prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar dapat menjadi landasan pada semua instansi pemerintah secara profesional. Prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *transparansi*, *akuntabilitas*, *pertanggungjawaban*, *independensi* dan *keadilan* dalam penjelasan kelima prinsip tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:⁴³

a) *Transparansi*

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan *Corporate Governance* yang Islami. Memberikan informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di organisasi dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap organisasi

⁴² Mohammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPB, 2014), h. 651-652.

⁴³ Novi Widiyanti Wulandari., *Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Alternatif dalam Penerapan Good Corporate Governance*. (Universitas Jember: 2009) h.104-111.

menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan organisasi.

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia karena merupakan bentuk pertanggung jawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Dalam Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Dalam hal ini Islam menekankan kepada umat manusia agar memiliki sikap yang adil serta sesuai dengan takarannya terutama dalam bermuammalah seperti yang ditegaskan Q.S Huud ayat 85 yang berbunyi:⁴⁴

وَيَقَوْمٍ أَوْتُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ٨٥

Terjemahannya:

“Dan Syu’aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

b) Pertanggung jawaban (responsibilitas)

Dalam pertanggungjawaban keuangan organisasi juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan organisasi. Sehingga pemegang saham dan stakeholder dapat mengambil yang tepat. Prinsip ini pula sejalan dengan etika yang di ajarkan Islam bahwa kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dan selalu peduli serta berbuat

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 310.

kebaikan terhadap lingkungan yang ada pada sekitar kita, seperti yang dijelaskan Q.S Al Qashash ayat 77 yaitu:⁴⁵

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahannya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

c) Independensi

Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).” Prinsip ini pula yang diterapkan dalam Islam bahwa apapun yang kita kerjakan akan mempengaruhi kita dalam mempertanggung jawabkan sesuatu dan setiap orang harus mempertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan tanpa adanya orang lain yang memikul perbuatan itu. Dengan kata lain kepemimpinan itu harus bersifat mandiri.

Seperti yang dijelaskan oleh Q.S Faathir ayat 18:⁴⁶

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَفَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ
الْمَصِيرُ ١٨

Terjemahannya:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulnya untuknya sedikitpun meskipun (yang

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 556.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 740.

dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu)”.

d) Keadilan

Prinsip pencatatan yang jujur, akurat dan adil juga telah diatur bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Orang yang bertanggungjawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Sekali lagi, ini menunjukkan Islam menghendaki diselenggarakannya organisasi secara adil dan jujur bagi semua pihak. Dengan kata lain Islam juga menerapkan kita harus bersifat sesuai terhadap segala hal yang selalu mendirikan keadilan kepada semua manusia dimuka bumi agar terciptanya kemaslahatan seperti yang dijelaskan oleh Q.S Al-Maidah ayat 8:⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
 أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan pemaparan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keunggulan utama *Good Coporate Governance* dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen organisasi adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 144.

Allah maka *Good Corporate Governance* akan memotivasi organisasi yang jujur, dan adil.

5) Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah:

- a) Meningkatkan iklim kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- b) Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
- c) Mendorong antar organ perusahaan dalam membuat sebuah keputusan dan menjalankan sebuah tindakan juga dilandasi moral dan kepatuhan terhadap Undang-Undang serta adanya kesadaran dan tanggungjawab sosial.
- d) Mengoptimalkan nilai perusahaan pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha.
- e) Mendorong pengelola perusahaan secara profesional antar organ.
- f) Memperbesar kemaslahatan secara nasional dan keberadaan sebuah usaha yang dikelola secara baik.⁴⁸

6) Tahap -Tahap Penerapan *Good Corporate Governance*

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *Good Corporate Governance* menggunakan tahapan sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama:

- (a) *Awareness building*, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan

⁴⁸ Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance*, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2002), hlm. 35.

tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok

- (b) *Good Corporate Governance diagnostic assessment* atau tahap pemetaan merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan *Good Corporate Governance* saat ini. Langkah ini perlu guna untuk memastikan titik awal level penerapan *Good Corporate Governance* dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *Good Corporate Governance* secara efektif. Dengan kata lain, *Good Corporate Governance Assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.
- (c) *Good Corporate Governance Manual Building*, adalah langkah setelah *Good Corporate Governance Assessment* dilakukan.

c. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki *Good Corporate Governance* manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama sebagai berikut.

- (a) Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai *Good Corporate Governance* champion di perusahaan.

- (b) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perusahaan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi *Good Corporate Governance*.
- (c) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
- d. Tahap Evaluasi
- Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.⁴⁹

⁴⁹ Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Ray Indonesia, 2005), h. 112.

b. Teori Travel/ Biro Perjalanan

1) Definisi Travel/ Biro Perjalanan

Biro perjalanan (travel) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan suatu perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik didalam maupun diluar negeri. Menurut Foster, biro perjalana (travel) adalah sebuah perusahaan yang menjual rancangan perjalanan secara langsung pada masyarakat dan lebih khusus lagi menjual transportasi udara, laut, akomodasi penginapan, pelayaran wisata, wisata paket, asuransi perjalanan, dan produk lainnya yang saling berhubungan.⁵⁰

Travel dalam dunia transportasi memberi sumbangsi dengan mempermudah kegiatan pengurusan pemberangkatan seseorang atau kelompok karena cukup datang kekantor-kantor travel lalu akan dilayani sampe semua berkas yang dibutuhkan untuk pemberangkatan selesai semua diurus. Untuk perjalanan wisata merupakan suatu bentuk usaha yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata baik didalam negeri maupun ke luar negeri. Usaha perjalanan wisata ini menyediakan sarana periwisata dan segala hal yang terkait dibidang wisata. Usaha perjalanan wisata ini berbentuk badan usaha baik berupa perseroan terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), koperasi, Yayasan, atau bentuk usaha perorangan.⁵¹

⁵⁰ Kartika Sabir, *Peran Kerja Sama Antara Travel An-Nur Maarif Pare-pare dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare 2019), h. 30.

⁵¹ Oka A. Yoeti, *Tours and Travel Marketing* (Jakarta: Pradnya Paramita:2003), h. 33.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa biro perjalanan travel merupakan suatu perusahaan yang melayani perjalanan secara langsung kepada masyarakat untuk dapat berkembang usaha tersebut harus mendapatkan izin dari pihak yang berwajib sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2) Biro perjalanan Haji dan Umrah

Biro perjalanan Haji dan Umrah adalah suatu usaha yang berhubungan dengan dunia perjalanan ibadah haji dan umrah.

Penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah biro perjalanan yang telah mendapatkan Izin dari pihak Menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus.⁵² Banyaknya travel yang melaksanakan pemberangkatan ibadah haji, membuat kita harus memilih memilih travel yang terpercaya minimal memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

Biro perjalanan yang telah mendapatkan ijin Menteri terkait harus berbentuk badan hokum baik berupa PT atau setidaknya CV. Biro perjalanan yang telah berbentuk badan hokum tersebut selanjutnya melakukan pendaftaran sebagai biro perjalanan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji khusus, penyelenggaraan haji khusus harus memenuhi persyaratan kriteria yang telah ditentukan Kementerian Agama sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 35 ayat (4) PP Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:

- a) Telah memperoleh izin sebagai PPIU Menteri
- b) Telah menyelenggarakan jamaah umrah paling sedikit 300 orang

⁵² Republik Indonesia, *PP Nomor tahun 2021*, bab 1 angka 8.

- c) Memiliki kemampuan teknis menyelenggarakan ibadah haji khusus yang meliputi: kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasana serta manajemen.
- d) Memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank
- e) Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan yang telah diterapkan oleh Menteri dan ketentuan pemerintah kerajaan Arab Saudi.⁵³

3) Dasar Hukum Travel/Biro Perjalanan

Di Indonesia, usaha jasa Biro Perjalanan pertama kali diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pariwisata No. 16/U/II/88 Tanggal 25 Februari 1988 tentang pelaksanaan Ketentuan Usaha jasa perjalanan, dan disebut dengan biro Perjalanan Umum. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf b, disebutkan bahwa biro perjalanan umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan dalam negeri dan/atau diluar negeri. Usaha biro perjalanan wisata juga di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Kepariwisataaan.
- 2) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Pariwisata.
- 3) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/HK/PM/102.MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Wisata.⁵⁴

⁵³ Kartika Sabir, *Peran Kerja Sama Antara Travel An-Nur Maarif Pare-pare dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare 2019), h. 34.

⁵⁴ Litari Elisa Putri, *Tanggungjawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya (Studi Pada PT. Arie Tours dan Travel Cabang Bandar Lamoung)*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Bandar Lampung 2017, h. 34-35.

4) Manajemen Penyelenggaraan

Penyelenggara merupakan sebuah proses dan cara dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu, pada penyelenggara Haji dan Umrah memiliki bentuk rangkaian kegiatan yang dimana meliputi pembinaan, serta perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Adapun bentuk rangkaian pembinaan ibadah haji yaitu penerangan, penyuluhan, serta sebuah bimbingan dalam ibadah haji. Kemudian layanan dalam ibadah haji meliputi semua kegiatan jamaah mulai dari pendaftaran sampe kembali ke Tanah Air, adapun pelayanan diberikan termasuk dengan transportasi, akomodasi dan pelayanan kesehatan.

Manajemen haji merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan dalam kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen baik *planning, organizing, actuating, controlling, maupun evaluating*, untuk mencapai suatu tujuan sehingga terlaksana secara efektif dan efisien.⁵⁵ Penyelenggaraan bimbingan haji dibutuhkan manajemen haji untuk para penyelenggaranya.⁵⁶

- a) Pengetahuan (knowledge), diantaranya kecerdasan IQ dan wawasan
- b) Kreatif dan inovatif
- c) jujur, ramah, peka, simpati, empati, sabar, qanaah, lapang dada, istikamah, dan tanggung jawab
- d) Toleransi dalam menghadapi berbagai mazhab, keyakinan selama khilafah tersebut dalam koridor-koridor hukum yang diberikan oleh Al-Quran, Hadis, juga Ijma para ulama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah:

⁵⁵ Mahmud, *Manajemen Haji Umrah, dan Wisata Religi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm 83.

⁵⁶ Mahmud, *Manajemen Haji Umrah, dan Wisata Religi*, hlm 84.

- 1) Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
- 2) Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji.
- 3) Jamaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 4) Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.⁵⁷

Proses manasik haji diperlukan adanya penyelenggaraan manasik yang meliputi:

- a. Pembinaan, yaitu rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang haji, Pembinaan meliputi:

- (1) Pembinaan di Tanah Suci

Memberikan materi manasik Tata cara berpakaian ihram seperti dalam Niat ihram dan bacaan talbiyah, Tata cara tawaf, Tata cara sa'I, Tata cara tahallul, Tata cara wukuf, Tata cara Mabit di Muzdalifah, Tata cara Mabit di Mina, Tata cara Melontar Jumrah, Tata cara Nafar.⁵⁸

Persiapan di Tanah Air seperti dalam kegiatan memperbanyak tobat kepada Allah SWT, Menyelesaikan masalah keluarga, pekerjaan dan utang piutang, Silaturahmi dan mohon maaf, melaksanakan walimatus safar,

⁵⁷ Departemen Agama Direktorat Jenderal, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Jakarta: 2009), h. 2-3.

⁵⁸ Departemen Agama Direktorat Jendral, *Pola Pembinaan Jamaah Haji*, (Jakarta: 2007), h. 7-12.

sebelum berangkat melakukan shalat sunah 2 (dua) raka'at dan membaca do'a waktu akan berangkat.⁵⁹

(2) Pembinaan di Arab Saudi

Pada waktu di Bandara Jeddah, antri menunggu pemeriksaan barang bawaan dan passport kemudian keluar dengan tertib. Bagi gelombang satu jamaah menuju Madinah dan bagi gelombang dua dari Jeddah menuju Makkah hendaklah bersuci, memakai ihram, shalat dua raka'at dan berniat. Antri naik bus sesuai dengan petunjuk petugas.

(3) Di Madinah

Pada saat di madinah selama 8 hari melaksanakan shalat Arbain (40 waktu) di Masjid Nabawi, kemudian ziarah ke makam Nabi, Raudloh, Baqi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud dan lain-lain serta gelombang pertama yang akan ke Makkah mengambil miqat di Bir Ali (Zulkhaifah) atau pemonudukan.

(4) Di Makkah

Pada saat tiba dimakkah melaksanakan umrah bagi yang haji Tamattu' melaksanakan tawaf qudum bagi yang berhaji *Ifrad* dan *Qiran*, melakukan Shalat berjamaah, *I'tikaf* di Masjid Haram, dan beristirahatlah dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah.

(5) Di Arafah

Pada saat di arafah menempati kemah yang telah disediakan oleh *maktab*, kemudian memperhatikan dan mendengarkan pemberitahuan dan ceramah-ceramah bimbingan yang diberikan oleh petugas serta mendengarkan khutbah wukuf, lalu melaksanakan wukuf dan berangkat ke Muzdalifah.

⁵⁹ Departemen Agama Direktorat Jendral, *Modul pembelajaran Manasik Haji*, (Jakarta: 2006), h. 37.

(6) Di Muzdalifah

Setelah tiba di Muzdalifah perbanyak zikir, istiqhfar dan shalawat kepada Nabi, mencari krikil minimal 7 (tujuh) butir maksimal 70 (tujuh puluh) butir, setelah lewat tengah malam berangkat menuju Mina.

(7) Di Mina

Berangkat ke Mina tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, melaksanakan lontar *jumrah ula, wustha dan aqobah*, menuju Makkah tanggal 12 Dzulhijjah untuk yang nafar awal dan tanggal 13 Dzulhijjah untuk yang nafar tsani.

(8) Di Makkah setelah wukuf

Melakukan tawaf ifadah, bersiap-siap menuju ke Madinah atau Jeddah.⁶⁰

b. Pelayanan

Pelayanan yaitu kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi. Pelayanan yaitu kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen/customer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan inilah yang biasa disebut dengan pelayanan publik atau pelayanan umum dalam memberikan pelayanan pemerintah harus memperhatikan keinginan masyarakat sebagai pelanggan (*customer*).⁶¹

Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi, layanan transportasi dan layanan kesehatan. Bentuk-bentuk pelayanan sebagai berikut:

(1) Layanan administrasi.

⁶⁰ Departemen Agama Direktorat Jendral, *Modul pembelajaran Manasik Haji*, h. 38-39.

⁶¹ Imam Syaekani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, (Jakarta: CV. Prasati 2009), hlm 12.

Pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan haji yaitu memberitahukan kepada jamaah prosedur pendaftaran haji dan pelunasan BPIH, tata cara pengurusan paspor, dan tata cara saat di embarkasi.

(2) Layanan Transportasi

Layanan Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.⁶² Bidang perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transportasi jamaah haji yang meliputi pemberangkatan dan tempat embarkasi ke Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal Indonesia. Seperti Bus yang digunakan saat di tanah, Bus yang digunakan saat di tanah suci dan Maskapai penerbangan yang digunakan⁶³

(3) Layanan Kesehatan

Layanan Kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji.⁶⁴

(a) Layanan Kesehatan di Tanah Air

(b) Layanan Kesehatan Arab Saudi

(c) Perlindungan

Perlindungan yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah haji baik terhadap gangguan fisik maupun uang dan barang-barang jamaah haji selama mereka sedang menjalankan ibadah haji. Adapun Perlindungan ini meliputi:

- 1) Menjaga keamanan jamaah haji selama berada di Arab Saudi
- 2) Menjaga barang-barang jamaah haji ketika berada di pemondokan.⁶⁵

⁶² Departemen Agama Direktorat Jenderal, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji*, (Jakarta:2009), h. 3.

⁶³Departemen Agama Direktorat Jenderal, *Pola pembinaan Jamaah Haji*, h. 59.

⁶⁴ Departemen Agama Direktorat Jenderal, *Modul Pembelajaran Manasik Haji*, h. 7.

c. Teori Manajemen Syariah

1) Manajemen Syariah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Pengamat Bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, yaitu *Adarta Bihi*. Oleh karena itu, dalam *Elies Modern Dictiory English Arabic* kata management (inggris), sepadan dengan kata *tabdir*, *idarah*, *siyasah*, dan *giyadah* dalam Bahasa Arab. Dalam Alqur-an, tema-tema tersebut hanya ditemui tema *tabdir* dalam berbagai derivasinya. *Tabdir* adalah bentuk Masdar dari kata kerja *dabbara*, *tabdiran*. *Tabdir* berarti penerbitan, pengaturan, pengurus, perencanaan, dan persiapan. Secara istilah, *idarah* (manajemen) itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.⁶⁵ Tujuannya adalah hasil-hasil yang ditergetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut Didin Hafidhuddin dijelaskan bahwa manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, struktur organisasi yang sesuai serta sistem yang baik yang bersumber dari Al Qur'an dan sunnah Rosul serta membahas soal system, sistem ini disusun agar perilaku-perilaku didalamnya berjalan dengan baik. Sistem Umar bin Abdul Aziz, misalnya merupakan salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi, dan kontrol. Islam pun telah mengajarkan

⁶⁵ Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, h 18-19.

⁶⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 13

jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala barat.⁶⁷

Manajemen merupakan sesuatu yang fundamental dalam menjalankan setiap organisasi maupun badan usaha tertentu, instrumen ini sangatlah dibutuhkan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan yang di inginkan, secara umum manajemen dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan seni dengan menjadikan sumber tenaga orang lain sebagai sumber untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Manajemen mempunyai fungsi sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.⁶⁸

Sedangkan Manajemen Syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhoan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai akidah. Prinsip manajemen Islam yakni segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah Swt. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa transparan tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat darurat. Allah SWT sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ahs-Shaff dan surah Al-Haysr: 18.⁶⁹

Manajemen syariah dibangun atas tiga ranah, yaitu: manajemen, etika, dan spiritualitas. Ketiga ranah ini membentuk hubungan yang tak terpisahkan. Ketiga ranah berjalan membangun kekuatan dalam menjalankan amanah.

⁶⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 17.

⁶⁸ Amin Widjaja, *Manajemen, Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 6.

⁶⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah Kajian dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).

Dengan demikian, jika suatu proses manajemen berjalan menjalankan amanah, maka amanah merupakan metafora yang akan dibentuk. Dengan demikian, jika metafora amanah yang akan dan telah dibentuk, maka di dalamnya akan ditemukan tiga hal penting, yaitu: pihak pemberi amanah, pihak penerima amanah dan amanah itu sendiri.⁷⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen Syariah adalah sebuah aktivitas untuk menertibkan, mengatur serta berpikir yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, penataan suatu organisasi yang baik serta sistem yang sesuai dengan Al Qur'an dan sunnah Rosul.

2) Fungsi Manajemen Syariah

Pada ajaran Islam, manajemen memiliki unsur-unsur yang tidak jauh dengan konsep manajemen secara umum, hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadits sebagai falsafah hidup manusia.⁷¹

a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, artinya seluruh fungsi dapat sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategi menuju sukses. Proses perencanaan strategis dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan. Proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya untuk:

- a) menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang,

⁷⁰Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 71.

⁷¹ Sudono Sukirno, *pengantar bisnis* (Jakarta kencana,2006), h. 3.

- b) merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan tercapai
- c) serta menentukan dana yang diperlukan dan factor-faktor produksi lain yang akan digunakan.⁷²

Ketiga unsur merupakan harus ada dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam setiap usaha merumuskan tujuan tanpa menentukan cara pelaksanaannya dan tanpa didasarkan pada factor-faktor produksi yang dapat digunakan tidak akan dapat menciptakan hasil yang diharapkan.

b. Fungsi Pengorganisasian

Perlu merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijadikan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Ajaran Islam adalah yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu secara terorganisasian dengan rapi. Pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasian. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Dalam sebuah organisasi tentu ada atasan dan bawahan. Pimpinan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan kegiatan kearah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui struktur organisasi ini dapat ditentukan pembagian tugas yang akan dibuat.

c. Fungsi Kepemimpinan

Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan yaitu umara yang disebut dengan ulul amri. Ulul amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Pimpinan sering disebut khadimul ummah yang berarti pelayanan umat. Menurut istilah itu,

⁷² Muhammad Ismail Yusanto dkk, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), h. 3.

pimpinan harus menempatkan diri untuk pada posisi pelayanan masyarakat (pelayan).⁷³

d. Fungsi Pengawasan

Falsafah dalam fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembanya. Jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dikerjakan.⁷⁴ Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjaukannya dari bentuk penyimpanan dan menuntunya konsistem menjalankan hokum-hukum dan syariat Allah dalam setiap aktivitasnya. Dan ini merupakan islam, sekalipun demikian, islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detail

Berkaitan dengan hakekat dan realitas manajemen syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan atau persoalan agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya, maka hal ini menderivasikan adanya prinsip-prinsip manajemen syariah yang meliputi: keadilan, amanah dan pertanggungjawaban, dan komunikatif. Selain itu, Rasulullah saw mengajarkan sifat-sifat kejujuran (*sidq*), dan memiliki kecerdasan (*fathanah*) PAREPARE sebagai berikut:

(1) Keadilan

Kata kunci yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan konsep keadilan adalah *`adl* dan *qist*. *'Adl* mengandung pengertian *sawiyyat*, dan juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan. Penyamarataan dan kesamaan iini berlawanan dengan kta *zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan). *Qist* mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata. *Taqassata* salah

⁷³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, h.118.

⁷⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah dan Aktualisasi Syariah Modern*, (Yogyakarta: Andi 2011), h. 39.

satu kata derivasinya juga bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat, dan *qistas*, kata turunan lainnya, berarti keseimbangan berat. Sehingga dua kata di dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk menyatakan keadilan yakni '*adl*' dan *qist* mengandung makna distribusi yang merata, termasuk distribusi materi. Keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an, juga bermakna menempatkan sesuatu pada proporsinya⁷⁵

(2) Amanah dan Bertanggungjawab

Seorang manajer dalam menjalankan tugasnya harus mengembangi amanah dan bertanggungjawab. Dalam hal amanah dan pertanggungjawaban, Islam menggariskan dalam firmanNya dalam QS. al-Mu'minuun/ 23: 8 berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُونَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya⁷⁶

Tafsir ayat tersebut menurut Ibnu Katsir yakni jika mereka diberi kepercayaan, maka mereka tidak akan mengkhianatinya tetapi mereka menunaikannya kepada yang berhak. Dan jika mereka berjanji atau melakukan akad perjanjian, maka mereka menepatinya, tidak seperti sifat-sifat orang munafik⁷⁷ Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa amanat yang berada dalam pundak manusia mencakup empat aspek: (1) antara manusia dengan Allah, seperti aneka ibadah, misalnya zakat. (2) antara seseorang dengan orang lain, seperti titipan, rahasia, dan lain-lain. (3) antara seseorang dengan lingkungan, antara lain menyangkut

⁷⁵Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 73.

⁷⁶. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 474.

⁷⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), h. 204.

pemeliharaannya agar dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang. Dan (4) amanat dengan dirinya sendiri, antara lain menyangkut kesehatannya.⁷⁸

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Persoalan lebih lanjut berkenaan dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab dan sumber tanggung jawab tersebut. Persoalan ini terkait dengan amanah yang telah dikemukakan, yaitu amanah dari Tuhan berupa tugas-tugas berupa kewajiban yang dibebankan oleh agama, dan amanat dari sesama manusia, baik amanah yang bersifat individual maupun organisasional.

(3) Komunikatif

Dalam manajemen syariah, komunikasi (*tabligh*) menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Pentingnya komunikasi dalam manajemen syariah menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Ketepatan penyampaian komunikasi ini, selanjutnya disebut sebagai komunikatif. Berkaitan dengan komunikasi yang komunikatif ini dalam QS. Thaahaa/20:44 yang berbunyi:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Terjemahnya:

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir’aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan dia sadar atau takut”.⁷⁹

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Volume: 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 160.

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, h. 435.

Ayat tersebut terkait pembicaraan dengan Fir'aun, yakni pembicaraan yang lemah lembut agar lebih dapat menyentuh hati dan lebih dapat menariknya untuk menerima dakwah. Sebab dengan perkataan yang lemah lembut, maka hati orang-orang yang durhaka akan menjadi halus dan kekuatan orang-orang yang sombong akan hancur.

Ayat diatas menjadi dasar tentang perlunya sikap bijaksana dalam berdakwah yang anantara lain ditandai dengan ucapan-ucapan sopan yang tidak menyakitkan hati sasaran dakwah. Karena Fir'aun saja, yang demikian durhaka, masih juga harus dihadapi dengan lemah lembut. Memamng dakwah pada dasarnya adalah ajakan lemah lembut.⁸⁰ Berdasarkan ayat diatas, dapat dilihat bahwa komunikasi yang komunikatif sangat diperlukan baik untuk berdakwah, maupun untuk memasarkan produk.

(4) Kejujuran

Kejujuran bagi seorang manajer merupakan hal yang prinsipil, yang harus ditegakan sehingga semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.

(5) Menggunakan kecerdasan dan pemikiran

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nahl/ 16: 44 berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“(mereka Kami utus) dengan membawa Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu *adz-Zikr* (Al-Quran) kepadamu, agar engkau menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka⁸¹ dan agar mereka memikirkan”⁸².

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume: 8, h. 306

⁸¹ Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al Quran.

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 370.

Penafsiran ayat di atas bahwa para Rasul yang Kami utus sebelummu itu semua membawa keterangan-keterangan yakni mukjizat-mukjizat nyata yang membuktikan kebenaran mereka sebagai rasul, dan sebagian pula membawa *zabur* yakni kitab-kitab yang mengandung ketetapan-ketetapan hukum dan nasihat-nasihat yang seharusnya menyentuh hati, dan Kami turunkan kepadamu *adz-Dzikir* yakni Al-Qur'an agar engkau menerangkan kepada seluruh manusiaapa yang telah diturunkan kepada mereka yakni Al-Qur'an itu, mudah-mudahan dengan penjelasanmu mereka mengetahui dan sadar supaya mereka senantiasa berpikir lalu menarik pelajaran untuk kemaslahatan hidup duniawi dan ukhrawi mereka.⁸³

Dapat dipahami bahwa Ayat tersebut menggambarkan manusia diperintahkan untuk selalu berpikir dan belajar. Jadi seorang manajer harus cerdas dan mampu berfikir dalam menangani dan memecahkan permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dengan mewujudkan kondisi yang rasional, efektif dan efisien.

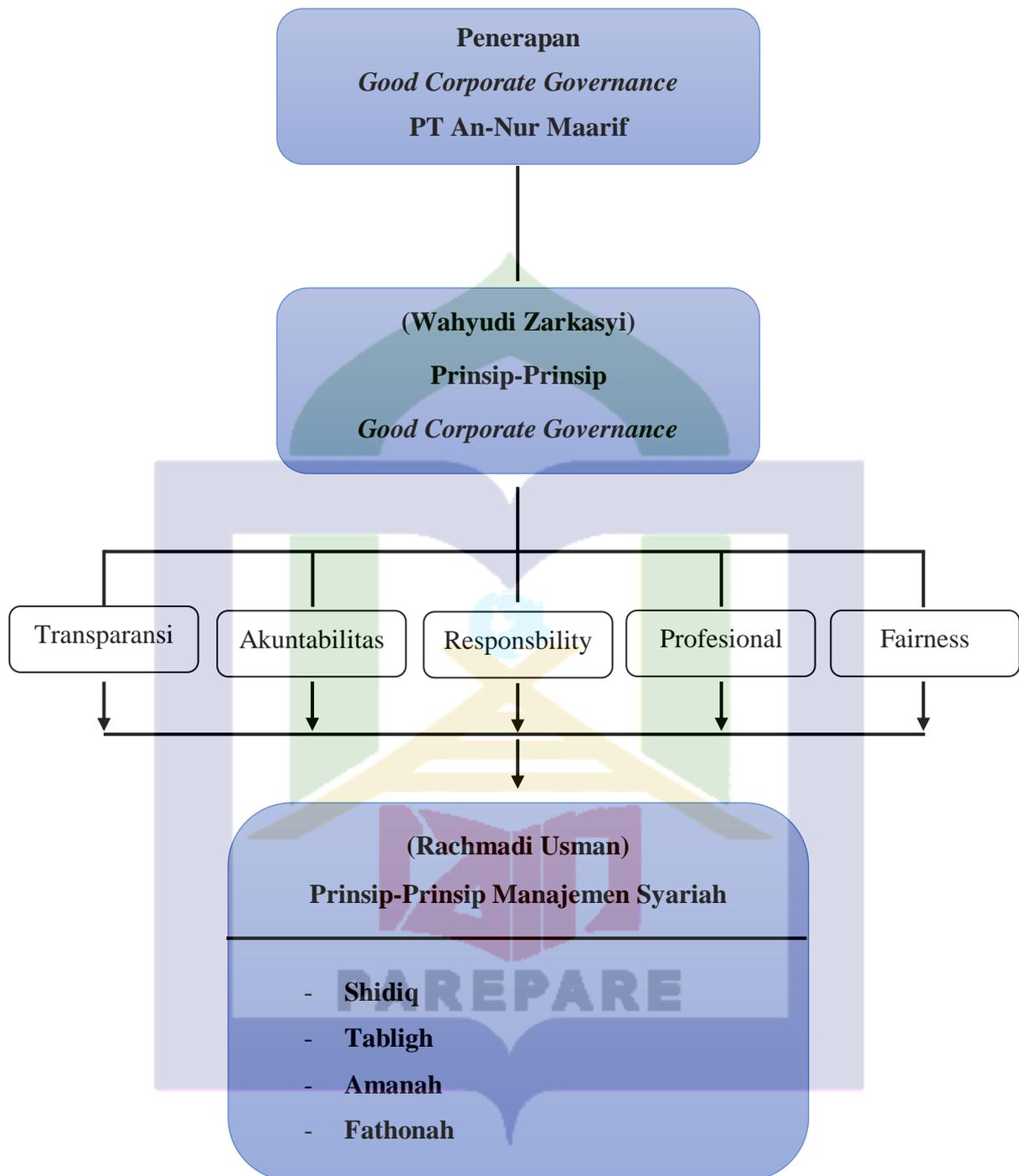
D. Bagan Kerangka Teoritis Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap untuk meningkatkan manajemen pelayanannya. Adapun penerapan prinsip yang diambil yaitu: transparansi, akuntabilitas, responbilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran. Maka selanjutnya akan di analisis dengan

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume: 7, h. 237.

Manajemen Syariah apakah Penerapan Good Corporate Governance tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari manajemen syariah yang diambil dari Shidiq, Tabligh, Amanah dan fathonah serta menggunakan kecerdasan dan pemikiran. Dengan penggunaan prinsip tersebut, penulis ingin mengidentifikasi apakah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Untuk lebih memahami kerangka teoritis tersebut maka dapat dilihat dalam bagan kerangka fikir sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan jenis ini karena beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan,
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber,
- c. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁸⁴

Dengan melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian dengan menggunakan fenomenologis berusaha untuk memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia didalam situasinya yang khusus. Sedangkan Menurut Sutopo bahwa pendekatan fenomenologis menekankan pada berbagai aspek subjektif dari perilaku manusia supaya dapat memahami tentang bagaimana dan apa makna yang mereka bentuk dari berbagai peristiwa dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁸⁵ Dengan demikian disuatu sisi makna itu muncul dengan cara membiarkan realitas /fenomena/pengalaman itu membuka dirinya dan makna itu muncul sebagai hasil interaksi antara subjek dengan fenomena yang

⁸⁴ Leczy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

⁸⁵ Sutopo. *Metodelogi Peneltian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2002), h, 27.

dialaminya.⁸⁶ Sedangkan fenomenologi dari pemikiran *Alfred Schutz* yaitu menjelaskan bahwa penelitian ini lebih sistematis, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia social.⁸⁷

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel beberapa pengurus pengelola PT. An-Nur Maarif serta para jamaah haji dan umrah. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, diharapkan dapat memaparkan keadaan yang sebenarnya mengenai penerapan *Good Corporate Govenance* Pada PT. An-Nur Maarif di Kab. Sidrap (Analisis Manajemen Syariah)

B. Paradigma Penelitian

Menurut Harmon, sebagaimana yang dikutip Moleong, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas.⁸⁸ Adapun beberapa paradigma penelitian sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Sidrap memiliki beberapa biro perjalanan/Travel
- 2) PT. An-Nur Maarif memiliki berbagai macam pelayanan dalam kegiatan pemberangkatan haji dan umrah dalam menarik minat calon jamaah haji
- 3) Seharusnya penerapan *Good Coorporate Governance* yang baik dapat meningkatkan kualitas PT. An-Nur Maarif.

⁸⁶ K. A. Foss dan Littlejohn, S.W, *Theories of Human Communication*, 8th Edition. Belmont, USA: Thomson Learning Academic Resource Center, 2005, h..38.

⁸⁷ Nindito Stefanus, *Fenomenologi Alferd Schutz: Studi Tentang Kontruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Social*. (Jurnal Ilmu Komunikasi Volume2 Nomor 1, Juni 2005), hlm 79.

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 49.

Penerapan *Good Corporate Governance* seharusnya bisa menjadi daya tarik/alasan calon jamaah dalam memilih PT An-Nur Maarif sebagai travel perjalanan haji dan umrahnya.

C. Waktu Dan Lokasi

a) Waktu Penelitian

Adapun waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selama ± 2 bulan dengan berbagai tahapan, mulai dari pengusulan judul, seminar proposal penelitian, pengurusan surat penelitian, pengumpulan data, penyusunan laporan hasil penelitian dan pembahasan hingga selesainya seminar hasil penelitian.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap, yang difokuskan sebagai objek penelitian adalah PT. An-Nur Maarif serta umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji dan umat Islam yang sudah melaksanakan ibadah haji.

Lokasi penelitian sengaja diambil oleh peneliti mengingat PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap merupakan lembaga yang beroperasi sejak lama yang tujuannya melayani dan membimbing kaum muslim dalam menjalankan ibadah haji sesuai dengan Sunnah Rasulullah Saw serta meraih haji yang mabrur yang tiada balasny kecuali surga.

PT An-Nur Maarif didirikan pada tahun 2003 dan mendapatkan izin resmi sebagai penyelenggara Umrah dan Haji khusus, izin Umrah Nomor 287/2017 dan izin Haji khusus Nomor 522/2017. Pada awalnya Annur didirikan dalam bentuk Yayasan (KBIH) yang dikenal dengan An-Nur group pada tahun 2009 An-Nur berdiri dalam bentuk perseroan terbatas (PT) yang dikenal dengan PT. An-Nur Maarif, sejak tahun 2000 sampai sekarang selalu membantu jama'ah

haji reguler Kabupaten Sidrap. Kemudian sejak tahun 2007 sampai sekarang selalu memberangkatkan jama'ah haji khusus. Dan sejak tahun 2010 PT. An-Nur Maarif mulai memberangkatkan jama'ah umrah dibawah bendera An-Nur sendiri. An-Nur warna brandnya adalah warna ungu.

Sebagai perusahaan swasta yang menawarkan biro perjalanan haji khusus dan umrah, saat ini PT. An-Nur Maarif berpusat di Jl. Ganggawa No. 7B Pangkajene Kabupaten Sidrap dan memiliki 7 kantor cabang di beberapa kota Sulawesi Selatan diantaranya Kantor Cabang Makassar yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM.17 Ruko Sudiang Indah No. 1 Kota Makassar, Kantor Cabang Pare-pare Jl. Jend. Sudirman, Ruko Andalusia No. 1 Kota Parepare, Kantor Cabang Pinrang Mall Sejahtera Kabupaten Pinrang, dan Kantor Cabang Bone Jl. Jend. Ahmad Yani No.5 Kabupaten Bone, Kantor Cabang Bone berdiri sejak tahun 2017, Kantor Cabang Wajo Jl. Jend Sudirman No. 50 Sengkang Kabupaten Wajo, Kantor Cabang Sorowako Jl. Jend Sudirman No. 18 Wawondula Kabupaten Luwu Timur, Kantor Cabang Masamba Jl. Jend Sudirman No. 7 Kota Masamba. Selain di Sulawesi Selatan PT. An-Nur Maarif juga memiliki Kantor Cabang Jakarta Jl. Taruna Pulo Asem Raya Utara No. 18A Pulo Gadung Kota Jakarta Timur, Kantor Cabang Aceh Jl. Nasional No. 99 SP. 4 Rundeng Maulaboh Aceh Barat, Kantor Cabang Bogor Jl. Raya Narogong Blok E No. 3 Cileugsing, dan terakhir Kantor Cabang Palembang Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 88 Komp. Pasar Gubah.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.⁸⁹

(a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.

Adapun untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan Cara melakukan wawancara. Penentuan informan dalam wawancara dipilih berdasarkan pada beberapa karakteristik tertentu, yaitu *pertama* orang yang mengetahui informasi mengenai PT. An-Nur Maarif dalam hal ini adalah kepala pimpinan, staff. Selain wawancara terhadap pihak PT. An-Nur Maarif juga akan dilakukan wawancara dengan jammah hal ini yang dimaksud adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai warga masyarakat Sidrap yang tergabung dalam PT. An-Nur Maarif.

(b) Data sekunder dmerupakan data yang tidak langsung diambil dari para informan Akan tetapi melalui dokumen.⁹⁰ Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pembahasan *Good Corporate Governance*, seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan, serta yang lain berupa hasil laporan penelitian dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.⁹¹

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Bokdam dan Biklen dalam *Djam'an* dan *Aan Qamariyah* mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah merupakan

⁸⁹A. Qadir Gassing HT dan Wahyuddin Halim, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet. II, (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 12.

⁹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.XII, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 137.

⁹¹ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 93.

komponen kunci dalam suatu penelitian.⁹² Peneliti menggunakan beberapa pedoman instrument dalam penelitian, hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a) Panduan observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala praktis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁹³ Observasi yang dimaksud adalah mengamati dan melihat secara seksama bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* yang diterapkan PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap, dan bagaimana analisis manajemen Syariah yang diterapkan oleh PT. An-Nur Maarif. Dalam observasi ini peneliti menggunakan cara observasi partisipatif yakni dalam pengamatan penelitian melibatkan secara aktif dengan subjek yang diteliti sehingga memperoleh informasi yang mendalam tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. An-Nur Maarif. Untuk memudahkan penulis dalam melakukan observasi maka dibuatlah pedoman yang dipakai untuk mengamati apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian.

b) Pedoman wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk instrumen yang sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung dari responden. Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiha

⁹²Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 62.

⁹³ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

dalam bukunya Metodologi Penelitian (teori dan praktek), mengatakan bahwa *interview* atau sering disebut wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. *Interview* digunakan peneliti untuk menilai keadaan yang sebenarnya. Adapun alat yang digunakan adalah berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data, alat tulis, kamera, alat perekam, laptop untuk mencatat data (dalam kondisi tertentu).⁹⁴

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara narasumber pada wawancara mendalam dalam penelitian ini, adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Informan yang menjadi narasumber meliputi Kepala Kementrian Agama, Pengurus PT. An-Nur Maarif serta jema'ah/anggota PT. Annur Maarif di Kab. Sidrap. Untuk dapat memandu penelitian dalam menginterview informan maka terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara agar wawancara dapat fokus pada hal-hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan data.

c) Format catatan dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.⁹⁵ Data yang dikumpulkan dengan Teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan Teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari

⁹⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 151-152.

⁹⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta 2008), h. 158.

pihak pertama.⁹⁶ Dalam hal ini, data yang peneliti temukan serta mengambil foto-foto yang kegiatan serta rekaman yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahapan pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

- 1) Tahap persiapan
 - (a) Seminar proposal penelitian
 - (b) Persiapan surat izin penelitian
 - (c) Melakukan observasi awal lokasi
 - (d) Menyusun pedoman wawancara
- 2) Tahap pelaksanaan
 - (a) Melakukan observasi lanjutan
 - (b) Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data.
 - (c) Melakukan dokumentasi terkait dengan bukti penelitian.
- 3) Tahap akhir
 - (a) Tahap pengumpulan data
 - (b) Tahap reduksi data
 - (c) Tahap penyajian data
 - (d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Setiap tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan berlangsung selama kurang lebih dua bulan pada masa penelitian.

⁹⁶ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (cet: Jakarta Bumi Aksara, 2008), h. 69.

G. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, dan menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁹⁷ Dalam menganalisis data kualitatif yang bersifat induktif, yang dimana data diperoleh, selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu.

Menurut Sugiyono terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data.⁹⁸ Dalam penelitian selain dibutuhkan metode yang tepat, perlu juga memilih teknik dan pengumpulan data yang relevan agar hasil dari penelitiannya objektif. Zuriah⁹⁹ menyatakan bahwa, Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen dalam pengumpulan datanya.

(a) Observasi

Pemanfaatan observasi dalam pengumpulan data penelitian sosial dianggap sangat penting, terutama dalam menghadapi masyarakat yang tertutup. Sehingga peneliti dapat lebih memahami dan mendalami pola pikir dan pola kehidupan masyarakat yang diteliti. Menurut Bungin Observasi

⁹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi reseach*, (Yogyakarta: Andi offset, 2004), h. 244.

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* h., 193.

⁹⁹Zuriah Nuzul, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 171.

adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Sedangkan menurut Riduwan observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan melakukan pengamatan langsung objek yang akan diteliti yang dalam pengamatannya menggunakan pancaindera mata.

Dalam hal ini, observasi dilakukan dalam rangka mengamati secara langsung terhadap penerapan *Good Corporate Governance* di Kabupaten Sidrap. Objek observasi ini menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan minat masyarakat untuk memakai jasa PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap.

(b) Wawancara

Menurut Zuriyah adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁰⁰ Sedangkan Menurut Sugiyono menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁰¹

Dalam hal ini, peneliti melakukan teknik wawancara dengan tujuan menggali informasi mendalam dari responden mengenai hal yang akan

¹⁰⁰Zuriyah Nuzul, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, h. 179.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 194.

diamati dan sebagai studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Wawancara merupakan salah teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*inerview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁰²

Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pengelola PT. Annur Maarif di Kabupaten Sidrap, masyarakat Kabupaten Sidrap dalam hal ini calon jamaah serta staf bagian administrasi PT. Annur Maarif Kabupaten Sidrap dalam rangka untuk mendapatkan data tambahan yang diperlukan.

(c) Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan mendapatkan data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁰³ Dalam dokumentasi metode ini dapat pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti

¹⁰² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

¹⁰³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 158.

catatan, data arsip, serta cacatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian dilapangan.¹⁰⁴

Dalam penelitian di lapangan, peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan bahan maupun informasi yang akan mendukung penelitian ini, serta sebagai bagian dari teknik pengumpulan data yang lain untuk saling menguatkan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data seperti data program atau produk PT. An-Nur Maarif, daftar calon jamaah, yang akan menguatkan penelitian ini dan foto-foto saat wawancara sebagai bukti otentik di lapangan serta foto-foto tentang lokasi.

H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data kualitatif.¹⁰⁵ Sedangkan Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga sudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁶ Analisis data ini akan menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang

¹⁰⁴Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)* (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 30.

¹⁰⁵Zuriah Nuzul, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, h. 198

¹⁰⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 335.

bersangkutan.¹⁰⁷. Adapun dalam penelitian ini langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data menurut Sugiyono artinya merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁰⁸ Dalam melakukan reduksi data peneliti harus mempunyai wawasan yang luas, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono bahwa reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Peneliti dalam penelitian ini membuat rangkuman dan memilah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara, kemudian mengambil data yang pokok dalam penelitian. Selanjutnya data yang telah dipilah, dibuat kategorisasi dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian dengan pengkodean berupa angka atau huruf untuk menandai data-data tersebut untuk masuk ke bagian mana sehingga terlihat polanya. Kemudian dari hasil wawancara dari beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis, kegiatan ini bertujuan untuk menghapus data-data yang tidak diperlukan atau menggolongkan kedalam data yang menjadi focus permasalahan yang diteliti.

2. *Display data* (penyajian data)

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 338.

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 341.

Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi dan telah ditemukan polanya kemudian dipaparkan dengan jelas, terperinci dan menyeluruh dalam bentuk narasi maupun bagan, sehingga dengan demikian akan dapat gambaran yang jelas di lapangan.

3. Conclusion drawing/verification

Langkah ke tiga dalam analisis data menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini kesimpulan yang diambil harus kredibel yang didukung oleh bukti. Kesimpulan kredibel menurut Sugiyono merupakan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.¹¹⁰

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹¹¹ Sedangkan menurut Sugiono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 345

¹¹¹ Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 330.

menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan informan yang telah ada.¹¹²

Dalam bukunya Sugiono triangulasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber dan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga macam triangulasi tersebut yaitu:

- 1) Trianggulasi Teknik, Menurut Sugiono triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari informan yang sama.¹¹³ Adapun triangulasi teknik ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk informan yang sama secara serempak.
- 2) Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.¹¹⁴
- 3) Triangulasi waktu, Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada waktu yang berlainan memungkinkan berbeda. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kapasitas datanya. Sedangkan Mathinson mengemukakan bahwa *“the value of triangulation lies in providing evidence, whether convergent in consistent, or contraccdictory”*¹¹⁵

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h h.156.

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h.157.

¹¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h.159.

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...h*, 160.

maksudnya nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi ini adalah untuk dapat mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi.

Oleh sebab itu, dengan melakukan teknik triangulasi dalam mengelola keabsahan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Selain itu, dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data tersebut apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.

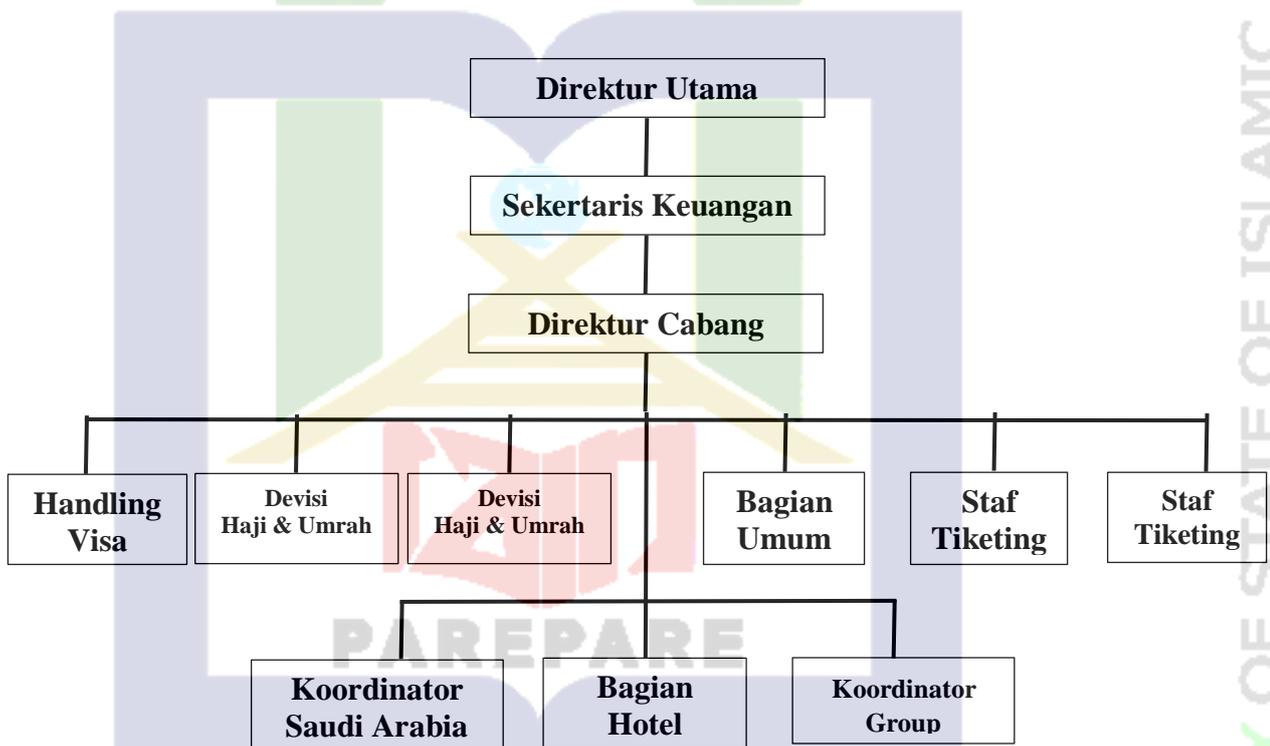


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada setiap Lembaga atau perusahaan pasti memiliki susunan stuktur organisasi. Bagan organisasi dibuat untuk mengetahui setiap tugas dan tanggungjawab berdasarkan posisinya masing-masing. Dengan memiliki struktur di dalam perusahaan pastinya untuk mencapai tujuan perusahaan.



Keterangan:

1. Direktur utama adalah pimpinan utama dalam pengambilan keputusan dan tanggungjawab atas tercapainya tujuan perusahaan serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Tugas dan wewenang direktur utama meliputi: pertama, menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka Panjang maupun jangka pendek, kedua, mengkoordinir dan

mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan, ketiga, membuat peraturan intern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan, keempat, memperbaiki dan menyempurnakan segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

2. Sekretaris keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi: pertama, menyiapkan segala keperluan yang diperlukan jamaah haji dan umrah, kedua, memberikan informasi terbaru kepada calon jamaah haji dan umrah terkait dengan travel, ketiga menginput data-data calon jamaah haji dan umrah serta mengecek kelengkapan dokumen pada saat registrasi dan mengerjakan segala bentuk laporan keuangan yang terkait pada travel.
3. Direktur cabang yaitu seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin cabang perusahaan untuk menjalankan manajemen sesuai standar dari kantor pusat.
4. Handling visa merupakan yang membantu memudahkan segala aktivitas jamaah pada saat berada di bandara seperti: menangani setiap bagasi jamaah, menangani kargo pesawat, melakukan unloading serta loading pesawat (antar jemput bagasi), membantu jamaah dalam proses check-in, boarding, hingga pemilihan seat, dan menawarkan pertolongan kepada jamaah yang membutuhkan khusus (seperti kursi roda), mengantarkan penumpang berkursi roda hingga ke dalam pesawat, kemudian menjelaskan prosedur selama di bandara kepada para jamaah.
5. Divisi haji dan Umrah mempunyai tugas dan wewenang dalam mengatur jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji mulai dari

pendaftaran, mengurus ketika di Arab Saudi, sampai pemulangan ke Tanah Air. Dan bertugas dalam mengatur dan mengelola jama'ah yang ingin berangkat Umrah mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan.

6. Bagian Umum bertugas dalam hal umum seperti menyusun, mengatur, melaksanakan dan menyempurnakan tata kerja dan peraturan kepegawaian, mengevaluasi semua persiapan calon jama'ah dll.
7. Staf Tiketing mempunyai tugas dan wewenang dalam hal: melayani segala permintaan tiket pesawat baik domestic maupun internasional dengan dasar pelayanan adalah memberikan yang terbaik kepada konsumen dalam hal harga, rute, jadwal serta kemudahan dalam melaksanakan suatu perjalanan, memonitor persediaan dokumen yang dimiliki perusahaan seperti tiket, invoice, dan lain-lain pada setiap akhir tahun, kemudian melakukan pembukuan terhadap tiket yang dikeluarkan serta mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan kepada direktur.
8. Bagian hotel yang melakukan pengaturan dalam artian mengurus hotel untuk calon jama'ah.

1. Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu mekanisme dalam tata kelola organisasi secara baik yang melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif terhadap prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas (Pertanggungjawaban), keadilan (*fairness*), dan kemandirian (*indepency*) untuk mencapai tujuan organisasi.¹¹⁶

Berdasarkan definisi diatas peneliti akan menguraikan dari hasil wawancara, dan dokumentasi serta observasi dengan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Keadilan.¹¹⁷

Adapun hasil wawancara peneliti terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

a) *Transparancy* (Keterbukaan)

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan dalam memberikan suatu informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Dalam hal ini PT. An-Nur Maarif memberikan penjelasan yang benar sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa ada disembunyikan kepada anggotanya. Kemudian didalam visi dan misi perusahaan juga diberitahukan kepada semua anggota perusahaan sesuai dengan peraturan tertulis didalam perusahaan. Adapun visi misi PT. An-Nur Maarif.

¹¹⁶ Akhmad Syakkroza, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008), h. 48.

¹¹⁷ Wahyudi Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, (Bandung: Alfabeta,2008), h. 35.

a. Visi

- Sebagai sarana berhaji, berumrah dan berwisata lebih nyaman dan mengesangkan serta lebih amanah.
- Dari ummat untuk ummat

b. Misi

- Membantu para tamu Allah, khususnya calon jama'ah yang ada di daerah, tanggal keberangkatannya jelas (Pasti Insya Allah).
- Menjadi Perusahaan biro dan jasa yang berstandar nasioal atau internasional yang terwibah.

Sesuai dengan visi misinya PT. An-Nur Maarif mampu mewujudkan biro perjalanannya menjadi pilihan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Fajar Hari Sandy selaku costomer service PT. An-Nur Maarif sebagai berikut:

“Alhamdulillah dengan berjalanya waktu, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ini semakin berkembang, dapat dilihat dari setiap tahunnya kami memberangkatkan jama'ah umrah lebih dari 10.000 orang dan jamaah haji khusus lebih dari 200 orang/tahun. Namun kami tidak akan cepat berpuas diri karena sebagai manusia biasa tentunya kami tak luput dari kekurangan dalam memberikan pelayanan, karena itu kami senantiasa berintropeksi diri agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.”¹¹⁸

Kepercayaan masyarakat terhadap PT. An-Nur Maarif disebabkan oleh akses informasi yang begitu mudah didapatkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada adanya penyiaran kegiatan umrah/haji PT. An-Nur Maarif yang ditayangkan pada salah satu stasiun televisi local di Sidrap. Sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai biro perjalanan haji tersebut. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara yang di kemukakan oleh Hj. Salma yang memilih perjalanan biro haji PT. An-Nur Maarif seperti berikut berikut:

“saya naik haji lewat an-nur karena ku nonton di mitra tv pelayanannya sangat bagus, baru tetanggaku juga pake An-Nur naik haji. Jadi itu mi juga

¹¹⁸ Fajar Hari Sandy Ilyas” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif”, *Wawancara*, Pangkajene, 18 Mei 2021.

kupilih. Alhamdulillah bagus memang pelayanannya. Dibimbing terus ki sama pak aji yang damping ki”¹¹⁹

Selain Hj. Salma salah seorang jamaah PT. An-Nur Maarif yakni Hj. Andi Enteng mengemukakan alasannya memilih PT. An-Nur Maarif sebagai berikut:

“iya tosi iyya ampai upile molai Annur menre hajji apana engka balibolaku pura molai makkeda maka kanja pelayanna na. maderri aga lau wita okko televisi e. makanja tongeng yola menre haji. Mabessa ustads na”¹²⁰

Artinya:

“adapun alasan saya memilih PT. An-Nur Maarif naik haji karena tetangga saya juga pernah lewat travel tersebut, bagus sekali peyanannya. Sya juga biasa mennonton di Televisi. Bagus betul dilewati naik haji. Ustadsnya baik”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap PT. An-Nur Maarif disebabkan oleh akses informasi yang begitu mudah didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat dapat menilai PT. An-Nur Maarif sebagai Travel haji dan umrah yang baik melalui pembicaraan dengan tetangga atau media social seperti televisi.

Adapun, setiap praktiknya, perusahaan/Lembaga memiliki kewajiban untuk dapat memberikan macam transaksi yang benar sesuai dengan apa yang akan dijalankan. Oleh karena itu konsep *Good Corporate Governance* harus berperang penting dalam memberikan informasi yang cukup jelas, akurat dan tepat waktu pada seluruh kegiatan penting yang berhubungan dengan perusahaan terutama kondisi keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan karyawan PT. An-Nur Maarif bapak Fajar Hari Sandy Ilyas selaku customer service mengungkapkan bahwa:

“Transparansi sesama karyawan tidak terlalu menjurus terhadap semua karyawan terutama bagian keuangan masalah uang masuk dan keluar hanya bendahara dan saya yang tau begitupun dengan laba ruginya di

¹¹⁹ Hj. Badria, “Jamaah PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Baranti, 22 Mei 2021.

¹²⁰ Hj. Andi Enteng, “Jamaah PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Baranti, 13 Juni 2021

maskapai kami juga tidak tau karna ada pembicaraan dari awal antara aula dengan aula, masalah laba ruginya penerbangan langsung baku hantam sama orangnya garuda, begitupun dengan di Arab Saudi baik harga hotel, semua yang kita jalankan disini hanya melakukan transaksi rupiah itu semuanya secara Riil saja semua ada dicatatan beliau. Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi terhadap karyawan sebenarnya ada diketahui karyawan tapi ada juga tidak diketahui oleh karyawan dia masing-masing ada diposisinya”¹²¹.

Dapat kita simpulkan bahwa transparansi terhadap sesama karyawan itu ada diketahui karyawan ada juga tidak diketahui oleh karyawan misalnya bagian keuangan, uang yang masuk dan keluar hanya bendahara dan pihak yang tertentu yang tau, sedangkan karyawan lainnya mereka masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab disetiap posisinya.

Pada prinsip transparansi ini tidak hanya berhubungan dengan keuangan, tetapi pada kenyataanya transparansi yang lainnya mengenai keterbukaan dalam memberikan informasi, prosedur, keterbukaan register serta keterbukaan dalam menerima peran kepada masyarakat. Seperti memberikan informasi mengenai hal-hal yang ada di PT. An-Nur Maarif kepada masyarakat sekitar yaitu sumber sumber informasi yang dapat dipercaya. Penerapan prinsip transparansi di PT. An-Nur Maarif juga dibuktikan adanya kesamaan produk yang telah ditawarkan dengan apa yang telah diterima oleh jama’ah, dalam hal ini hasil wawancara bapak Erik Pisco Arishandy” Divisi Umrah Haji PT. An-Nur Maarif sebagai berikut:

“prinsip transparansi terhadap pihak penyelenggara kepada pihak jama’ah dari segi pelayanan, pertama mengenai masalah pesawatnya, misalnya kita tidak menjanjikan pesawat Lion tapi kita naiki pesawat garuda maksudnya harga yang telah diobservasi mulai dari pesawat, jumlah harinya, serta hotel bintang berapa sesuai dengan paket yang ada di di buku, media baik media cetak maupun online. Kemudian keterbukaan kedua mengenai masalah harganya, yaitu harga yang termasuk dan harga yang tidak termasuk, contohnya misalkan Si A sudah menyetorkan harga paket pemikiranya dia sudah melunasi semua tapi ada beberapa tidak termasuk sebenarnya misalkan dalam kelebihan bagasi itu tidak termasuk dalam harga paket jadi kita harus tranparansi ke jamaah bahwa ini yang termasuk dan ini yang tidak termasuk. Dan ketiga transparansi mengenai

¹²¹ Fajar Hari Sandy Ilyas,” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene, 18 Mei 2021.

perlengkapan pribadi, misalnya dalam hal password semua orang tidak memiliki paswod masa kita mau samakan harga paket orang yang punya password dengan harga bagi tidak memiliki password. Sedangkan password punya masa berlaku bukan hanya sekali pake tetapi masa berlakunya 5 tahun. Jadi Apabila kita samakan harga paket orang yang memiliki password dengan tidak memiliki password otomatis kita rugikan orang yang ada password”¹²².

Adapun Prinsip Transparansi yang ada di PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap dalam sistem rekrutmen pegawai itu tidak dilakukan secara terbuka hanya dilakukan secara internalnya saja. Sebagaimana hasil wawancara bapak Fajar Hari Sandy Ilyas,” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap:

“kami utamakan alumni sekolah penerbangan yang khusus jurusan staff bandara dan travel, meskipun ada lulusan s1 atau s2 yang diambil justru alumni penerbangan jurusan bandahara/travel.”¹²³

Dari hasil wawancara proses perekrutan pegawai di PT. An-Nur Maarif tidak dilakukan secara terbuka dan lebih mengutamakan alumni penerbangan tujuannya mereka tidak capek-capek lagi bikin trening, pelatihan-pelatihan, meskipun dilakukan trening tidak menjurus kedaras karena anak tersebut sudah punya dasar dibidang itu sehingga kami lebih memprioritaskan para alumni sekolah penerbangan.

Penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa trasparansi di PT An-Nur Maarif sudah dilakukan dengan baik. Namun prinsip transparansi yang ada belum sepenuhnya dilakukan terdadap beberapa faktor yang membuat penerapan transparansi belum terlaksana dengan baik yaitu seperti keterbukaan mengenai laporan keuangannya, laba ruginya serta dalam merekrutmen pegawai. sedangkan keterbukaan yang telah diterapkan oleh PT. An-Nur Maarif adalah keterbukaan dalam memberikan informasi terhadap

¹²² Erik Pisco Arishandy” Divisi Umrah Haji PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene, 3 Mei 2021.

¹²³ Fajar Hari Sandy Ilyas,” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene, 18 Mei 2021.

jamaah yaitu memberikan informasi dari segi pelayanan, masalah pesawat, masalah harga, serta masalah perlengkapan pribadi mereka sudah dijelaskan dengan tepat dan benar.

b) Akuntabilitas (*accountsbility*)

Prinsip dari Akuntabilitas ini, dimana dalam setiap perusahaan harus dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan dengan *job decription* yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar pada setiap pelaksanaan tugas tidak menimbulkan perbedaan antara satu dengan lainnya dalam melaksanakan tuganya masing-masing. Pada prinsip akuntabilitas ini juga dapat diterapkan agar seluruh perusahaan dapat menyadari tanggungjawab, hak, wewenang, dan kewajiban mereka masing-masing. Tingginya rasa tanggungjawab mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik.

Pada kejelasan fungsi dan wewenang yang telah diberikan sudah mampu diterapkan dengan baik sesuai dengan *job description* yang telah diterapkan oleh PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap. Akuntabilitas yang baik adalah memberikan pertanggungjawaban bawahan atas wewenang yang telah diberikan sehingga akuntabilitas merupakan factor diluar individu. Kemudian apa bila ada karyawan yang melakukan sebuah pelanggaran akan dikenakan sebuah sanksi.

Sebagaimana hasil wawancara oleh karyawan PT. An-Nur Maarif mengatakan bahwa:

“untuk kejelasan pertanggungjawab disini sudah kita sesuaikan di bidangnya masing-masing, misalnya pengurus lembaga akan mempertanggungjawabkan pada setiap masing-masing yang telah di delegasikan oleh pimpinan Lembaga, tetapi kami tetap saling membantu misalkan dibagian visa membantu bagian pengaturan kamar hotel, akan tetapi dia harus memfokuskan dulu di pekerjaannya masing-masing. Kemudian apabila ada karyawan yang melakukan sebuah kesalahan akan dikenakan sanksi yaitu berupa teguran. dan pimpinan juga mendisiplikan para anggotanya dengan mengaktifkan

absensi jam masuk kantor 09:00-16:30, masuk setiap hari senin-jumat memakai baju kantor dan tidak masuk pada saat tanggal merah”.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat kita simpulkan bahwa PT. An-nur Maarif Kabupaten Sidrap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Dimana setiap karyawan melaksanakan kewajibannya dalam bekerja sesuai dengan S.O.P yang berlaku.

c) Responsibility (Pertanggungjawaban)

Organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus menaati peraturan undang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka Panjang.¹²⁵

Penerapan prinsip dari Responsibility ini adalah sebuah tanggung jawab terhadap anggota jama'ah PT. An-Nur Maarif sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku tentang penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 2019, pasal 33 ayat (1) dimana “BIHI bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jamaah haji selama melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi” sebagaimana hasil wawancara dari salah satu karyawan PT. An-Nur Maarif menyatakan:

“pertanggungjawaban oleh pihak penyelenggara terhadap jama'ah kita bisa lihat dari segi harga paket, dan menyediakan fasilitas serta pelayanan yang ditawarkan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, dan proses adminstrasinya yang dilakukan cepat, tidak mempersulit anggotanya sehingga lebih nyaman dan terbuka, untuk membangun kepercayaan masyarakat kita tidak pernah memberikan rasa kecewa misalnya lain dijanjikan lain yang kita berikan. Agar jamaah ini berfikir untuk dapat menarik semua orang yang ada disekitarnya bergabung bersama kami.”¹²⁶

Pada PT. An-Nur Maarif dalam prinsip ini menuntut direktur maupun karyawan melakukan kegiatannya secara bertanggungjawab dimana Sebagai

¹²⁴ Fajar Hari Sandy Ilyas,” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif,” Wawancara, Pangkajene, 18 Mei 2021.

¹²⁵ Arif Nugroho, *Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Wujudkan Good Corporate Governance*, Jurnal Adminidrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, Sept-Des 2014, h. 60.

¹²⁶ Fajar Hari Sandy Ilyas,” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif,” Wawancara, Pangkajene, 18 Mei 2021.

pengurus travel hendaknya dihindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, serta bersifat kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat agar tidak terjadi namanya korupsi misalnya memakai uang jamaah untuk kehidupan pribadinya.

Jamaah PT. An-Nur Maarif merespon baik dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. An-Nur Maarif sebagaimana hasil wawancara Hj Asma sebagai berikut:

“ehh bagus sekali itu pelayanannya mulai dari manasik ki sampai kembali dari tanah suci selalu ki dilayan dengan baik, bagus juga hotelnya dekat. Pokoknya nyaman ki lewat An-Nur Maarif”.¹²⁷

Keunggulan PT. An-Nur Maarif salah satu travel terbaik penyelenggara ibadah haji dan umrah dan masih terus dipercaya oleh pemerintah untuk membimbing jamaah haji setiap tahunnya. Sistem penyelenggara yang baik itu telah memenuhi 6 syarat aturan pemerintah. Sebab agen yang memiliki agen resmi dapat dipastikan kualitasnya sangat bagus karena telah mengantongi izin dari Departemen Agama tidaklah mudah. Agar dapat mengantongi izin dari pemerintah sebuah agen harus memenuhi hal tersebut diantaranya.

- a. Izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementerian Agama RI
- b. Beroperasi sebagai biro perjalanan wisata minimal 2 tahun
- c. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan ibadah umrah dengan baik dilihat dari sumber daya manusia, manajemen serta sarana dan prasarana.
- d. Memiliki kemampuan keungan untuk menyelenggarakan ibadah umrah dibuktikan dengan catattan.
- e. Memiliki mitra biro perjalanan wisata di Arab Saudi yang telah mengantongi izin resmi dan pemerintah kerjaan.
- f. Memiliki komitmen menyelenggarakan ibadah umrah berdasarkan peraturan Menteri Agama dan Negara.¹²⁸

¹²⁷ Hj. Asma, “Jamaah PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Rappang, 2 Juli 2021

Dalam hal ketaatan peraturan pemerintah PT. An-Nur Marif sudah menaati peraturan pemerintah yang berlaku dengan mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Sidrap dalam usaha biro perjalanan Haji dan Umrah. Staff kasi haji dan umrah Kementerian Agama Kabupaten Sidrap membenarkan hal tersebut bahwa PT. An-Nur Maarif telah terdaftar dan mendapatkan izin perjalanan biro haji dan umrah. Sebagaimana hasil wawancara bapak H. Abd. Rahim, Kepala Kasi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Sidrap:

“yah, PT. An-Nur Maarif merupakan travel resmi yang terdaftar di Kemenag Sidrap dengan nomor operasional No. 811 Tahun 2020. Yang didirikan sejak tahun 2003. Dan saat ini dipimpin oleh H. Bunyamin M. Yapid.”¹²⁹

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa prinsip pertanggungjawaban di PT. An-Nur Maarif sudah diterapkan dengan baik dimana pihak penyelenggara telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah karena apabila jamaah telah merasakan kualitas pelayanan sesuai harapan dapat menimbulkan cerita fositif dari jamaah dan itu tentu sangat berpengaruh terhadap travel maupun mitra kerja perusahaan, serta pihak lembaga telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum yang telah berlaku.

d) Profesional / independensi

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan

¹²⁸ Kartika Sabir, *Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Maarf Parepare Dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-pare, 2019), h. 54.

¹²⁹ H. Abd. Rahim, “Kepala Kasi Haji dan Umrah Kementrian Agama Kabupaten Sidrap,” *Wawancara*, Pangkajene, 27 Mei 2021

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.¹³⁰

Kemandirian dalam perusahaan dibuktikan dalam pemberian pengakuan hak dan kewajiban bagi stakeholder atau pekerja perusahaan yang telah ditentukan dalam peraturan perusahaan. perusahaan itu dapat dikatakan memiliki kemandirian jika dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanga yang berlaku.

Eksistensi PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap tujuannya untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan sebuah ibadah haji dan umrah, dengan kehadirannya yang sangat mulia tersebut, tentunya PT. An-Nur Maarif berada dalam posisi yang independent (mandiri). Adapun prinsip PT. An-Nur Maarif “Melayani Tamu Allah Adalah Kemuliaan Bagi Kami” dan moto PT An-Nur Maarif “An-Nur Pilihan Tepat Bukan Pilihan Nekat”

Dengan niat semata-mata mencari keridhoan Allah dengan harapan mendapatkan pahala ibadah dengan jalan melayani perjalanan ibadah saudara muslim, biro perjalanan wisata, umrah dan haji khusus An-Nur Tour Travel berusaha sebaik-baiknya untuk melayani perjalanan umrh dan haji khusus sesuai amanat yang dipercaya. Biro perjalanan wisata, Umrah dan Haji Khusus An-Nur Tour and Travel merupakan satu-satunya perusahaan yang bergabung dalam himpunan penyelenggara Umrah dan Haji.

An-Nur Tour dan Travel bertujuan untuk memberikan salah satu jasa biro perjalanan umrah dan haji yang membantu dan melayani kaum Muslim dalam menunaikan ibadah umrah dan haji, begitupun melakukan perjalanan domestik maupun internasional. Adanya PT. An-Nur dapat memberikan manfaat bagi

¹³⁰ Vincentius Wintara Putra, *Penerapan Good Corporate Pada Perusahaan Properti PT. Multi Royu Indonesia*, Jurnal Agora Vol. 2. 2. Surabaya Universitas Kristen Petra, 2014, h. 2.

jamaah haji dan umrah dengan mudah melakukan ibadah haji dengan menyediakan beberapa fasilitas dari travel An-Nur Maarif memberikan pelayanan yang bagus dan menyediakan berbagai Tour domestik maupun internasional. Sebagaimana hasil wawancara Karyawan PT. An-Nur Maarif dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Selama 18 tahun berjalan kami mengedepankan profesionalitas dan pelayanan. Berbekal kepercayaan anda yang telah tumbuh, kami siap melayani dalam ibadah Haji dan umrah anda supaya mendapatkan haji/umrah yang mabrur. Untuk kenyamanan dan kekhususan beribadah. Insha Allah PT. An-Nur Maarif akan senantiasa mempertahankan akomodasi berbintang sebagai standar pelayanan yang dialokasinya dekat Mesjid Al-Haram dan Mesjid Nabawi. Kami juga akan mengurus segala kebutuhan jama’ah dari Makassar sampe kembali ke Makassar lagi seperti akomodas, komsumsi dan transportasi. Selain itu An-Nur jama’ahnya dari berbagai propinsi di Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan, Papua dan Jawa.”¹³¹

Pelayanan yang bagus dan professional yang dilakukan oleh PT. An-Nur Maarif dibuktikan dengan jumlah jamaah yang memberikan kepercayaan kepada PT. An-Nur Ma’arif sebagai travel perjalanan hajinya. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah jamaah haji yang diberangkatkan pada PT. An-Nur Ma’arif dari tahun ke tahun seperti berikut;

Tabel 3: Data Jamaah Haji/Umrah PT. An-Nur Ma’arif Tahun 2017

Tahun	Bulan	Jumlah Jamaah	Paket	Penerbangan
	Januari	143 Jama’ah	9 Hari	Saudia
			12 Hari	Silk AIR
	Februari	103 Jama’ah	11 Hari 13 Hari	Silk Air Garuda Indonesia
	Maret	180 Jama’ah	12 Hari	Silk Air Saudia

¹³¹ Fajar Hari Sandy Ilyas,” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene, 18 Mei 2021.

2017				Airliness Garuda Indonesia
	April	178 Jama'ah	12 Hari	Garuda Indonesia Silk Air
	Mei/Juni	212 Jama'ah	12 Hari 14 Hari (Awal Ramadhan) 15 Hari (Akhir Ramadhan) 30 Hari (Full Ramadhan)	Garuda Indonesia Saudia Airliness
	Novembe r	95 Jama'ah	12 Hari	Silk Air
	Desembe r	164 Jama'ah	12 Hari 14 Hari	Garuda Indonesia Silk Air
Jumlah		1.075		

Tabel 4: Data Jamaah Haji/Umrah PT. An-Nur Ma'arif Tahun 2018

Tahun	Bulan	Jumlah Jamaah	Paket	Penerbangan
	Januari	240 Jama'ah	9 Hari 12 Hari	Saudia Silk Air Garuda Indonesia
	Februari	109 Jama'ah	12 Hari	Garuda Indonesia Silk Air Saudia
	Maret	288	9 Hari	Garuda

2018		Jama'ah	12 Hari 15 Hari (Umrah Plus Turki)	Indonesia Saudia Paket Garuda/Turki
	April	278 Jama'ah	9 Hari 12 Hari	Garuda Indonesia
	Mei/Juni	203 Jama'ah	11 Hari 12 Hari 15 Hari (Awal Ramadhan) 18 Hari (Akhir Ramadhan Plus Program Syawal) 30 (Full Ramadhan)	Saudia Silk Air
	Oktober	85 Jama'ah	10 Hari 12 Hari	Silk Air
	November	293 Jama'ah	9 Hari 11 Hari 12 Hari 13 Hari	Garuda Indonesi Silk Air
	Desember	213 Jama'ah	12 Hari 13 Hari	Garuda Indonesia Silk Air
	Jumlah	1.709 Jama'ah		

Tabel 5: Data Jamaah Haji/Umrah PT. An-Nur Ma'arif Tahun 2019

Tahun	Bulan	Jumlah Jamaah	Paket/Hari	Penerbangan
-------	-------	---------------	------------	-------------

2019	Januari	328 Jama'ah	9 Hari 12 Hari	Silk Air Garuda Indonesia
	Februari	387 Jama'ah	9 Hari 10 Hari 11 Hari 12 Hari 13 Hari	Garuda Indonesia Silk Air
	Maret	282 Jama'ah	12 Hari 14 Hari	Garuda Indonesia Silk Air
	April	269 Jama'ah	12 Hari	Garuda Indonesia
	Mei	183 Jama'ah	14 Hari (Awal Ramadhan) (Akhir Ramadhan) (Puasa Itikad) 30 Hari (Ful Ramadhan)	Garuda Indonesia
	Juni	96 Jama'ah	12 Hari (Program Syawal)	Garuda Indonesia
	Oktober	340 Jama'ah	9 Hari 11 Hari 14 Hari	Silk Air Garuda Indonesia
	November	168 Jama'ah	11 Hari 14 Hari	Garuda Indonesia Silk Air
	Desember	373 Jama'ah	12 Hari	Garuda Indonesia Silk Air

				Batik Air
Jumlah		2.157 Jama'ah		

Tabel 6: Data Jamaah Haji/Umrah PT. An-Nur Ma'arif Tahun 2020

Tahun	Bulan	Jumlah Jamaah	Paket/Hari	Penerbangan
2020	Januari	144 Jamaah	9 Hari	Lion Air
			12 Hari	Silk Air
	Februari	646 Jamaah	12 Hari	Lion Air
Jumlah		790 Jamaah		

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebelum pandemic *covid-19* PT. An-Nur Maarif berhasil memberikan kepercayaan kepada ribuan jamaah tiap tahunnya. Selain bukti keprofesionalan dari kepercayaan jamaah, PT. An-Nur Maarif juga membuktikan keprofesionalnya dengan meraih beberapa penghargaan dibidangnya.

Dalam hal penghargaan kinerja PT. An-Nur telah mendapatkan beberapa penghargaan dari maskapai dan beberapa anugrah sebagai perusahaan terbaik, yaitu sebagai perusahaan terbaik dalam perjalanan travel dan perjalanan wisata pada tahun 2017, Perusahaan terbaik dalam pelayanan travel “ The Most Trusted Recognized” dan perusahaan terbaik “Indonesia Most Recommended Business Word 2017, dan penghargaan dari beberapa Lembaga, diantaranya The Best Agen Garuda 2016, The Best Tour & Travel Company Inservis Excellent Of The Year 2017, The Best Tour Servis dan lain-lain.

Didalam sebuah perusahaan kerjasama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan terhadap perusahaan, seperti halnya saat ini PT. An-Nur

telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan Maskapai yaitu Garuda Indonesia, Silk Air, Singapore Airlines, Saudi dan Turkish Airlines, serta media terdiri dari Susia.com dan warta Bone. Selain melayani umrah dan haji PT. An-Nur juga menawarkan pelayanan jasa pembelian tiket.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja PT. An-Nur Maarif termasuk perusahaan yang mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesional. Dilihat dari lamanya pendirian travel tersebut dan kepercayaan masyarakat terhadap biro perjalanan serta berbagai penghargaan yang telah dicapai PT. An-Nu Maarif.

e) Fairness (Kewajaran, kesetaraan atau keadilan)

Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam mempengaruhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya siapapun yang melakukan sebuah pelanggaran akan mendapatkan hukuman baik itu pemimpin perusahaan. Hal ini juga meliputi kejelasan terhadap hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak pemegang saham. Dimana perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap seluruh pekerja dalam hal ini suku, agama, ras, golongan gender dan kondisi fisik semuanya memiliki kesempatan kerja.¹³²

PT. An-Nur Maarif selalu memberikan hak-hak kepada anggotanya. Sebagaimana hasil wawancara oleh Erik Pisco Arishandy karyawan PT. An-Nur Maarif di bagian divisi umrah haji menyatakan sebagai berikut:

“dalam prinsip keadilan karyawan tidak dibeda-bedakan dengan karyawan lainnya, membangun kerja sama yang sehat dan saling memberikan motivasi. Namun apabila melakukan sebuah pelanggaran kami diberikan sanksi berupa

¹³² Vincentius Wintara Putra, *Penerapan Good Corporate Pada Perusahaan Properti PT. Multi Royu Indonesia*, Jurnal Agora Vol. 2. 2. Surabaya Universitas Kristen Petra, 2014, h. 2.

teguran. Jam kerja PT. An-Nur Maarif dari jam 09:00-16:30. Jadi, kita dituntut jadi orang yang bertanggung jawab dalam bidang masing-masing”¹³³

Oranisasi harus memperhatikan kepentingan semua *stakeholder* berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Berkaitan dengan kesetaraan terpenting terhadap kepuasan masyarakat. Pengurus PT. An-Nur Maarif memberikan pelayanan kepada seluruh calon jamaah tanpa memilih-milih antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hasil wawancara jamaah sebagai berikut:

“bagus sekali pelayanannya, seperti kalau saudara semua ki waktunya di sana, baik sekali juga pak aji yang damping ki selalu ki natanya kabar tag sama kondisi tag, pokoknya bagus bagus sekali pelayanannya, na samakan semua ki dengan jamaah yang lain.”¹³⁴

Hal yang serupa juga diungkapkan salah seorang jamaah yakni H. Lambogo juga menyatakan kepuasannya terhadap PT. An-Nur Maarif sebagai berikut:

“lewat An-Nur Maarif kita nyaman dan senang. Karna pelayanannya memuaskan. Mulai dari pengurusan, manasik haji, diperjalanan naik haji sampai disana hotelnya juga bagus, pelayannya pokoknya yang terbaik. Tidak rugi ki pilih An-Nur. Pokoknya puas ki dengan An-Nur. Kalau masih ada rezeki mau ka lagi naik umrah pake An-Nur”¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan PT. An-Nur Ma’arif kepada jamaahnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip keadilan (*fairness*) dimana pihak penyelenggara memberikan pelayanan yang terbaik mulai dari pendaftaran hingga berangkat ke tanah suci mereka tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak ada keperluan pribadi atau perlakuan yang special semua diperlakukan sama. PT. An-Nur Maarif juga adil terhadap karyawan dimana tidak ada yang dibeda-bedakan karyawan

¹³³ Erik Pisco Arishandy” Divisi Umrah Haji PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene, 3 Juli 2021.

¹³⁴ Hj. Nurmaidah, “Jamaah PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Rappang, 2 Juli 2021

¹³⁵ H. Lambogo, Jamaah PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Rappang, 24 Mei 2021

satu dengan yang lainnya serta memiliki kesempatan dalam mengembangkan karir yang sama terhadap setiap karyawan.

Menurut KNKG, salah satu tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui sistem manajemen yang berdasarkan prinsip-prinsip *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran*. Selain itu kegiatan terencana dan dapat terprogram akan tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola yang baik dengan sistem kerja yang sama dengan berbagai pihak terutama terhadap seluruh karyawan dan top manajemen. Sistem perusahaan yang baik dapat dikelola dibangunnya dan dijalankannya prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua *stakeholder*. Jadi dengan adanya prinsip *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran*, pada saat inilah wajib diterapkan diberbagai aspek dalam perusahaan khususnya PT. An-Nur Marif untuk mendorong terciptanya suatu usaha travel yang efisien dan transparan. Dan di PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap penerapan prinsip-prinsip GCG masih terdapat beberapa perlu diperbaiki dan lebih ditingkatkan.

2. Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Analisis Manajemen Syariah Pada PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap

Manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, struktur organisasi yang sesuai serta sistem yang baik yang bersumber dari Al Qur'an dan sunnah Rosul serta membahas soal system, sistem ini disusun agar perilaku-perilaku didalamnya berjalan dengan baik.¹³⁶

Konsep tentang *Good Corporate Governance* (GCG) sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Dalam perspektif Islam penerapan *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan karena prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selaras dengan ajaran Islam. Ajaran Islam selalu memperkenalkan etika yang baik, moral yang kuat, integritas, serta kejujuran, tidaklah mudah untuk menggabungkan nilai-nilai etika seperti itu menjadi *Good Corporate Governance* yang Islami.¹³⁷

Dengan sejalannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan manajemen Islam diharapkan juga mampu mewujudkan kepemimpinan yang baik dalam perusahaan. Islam sebagai aturan hidup (*nidham al hayat*) yang mengatur seluruh isi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara ataupun kiat dalam menjalani kegiatan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalankan kehidupannya secara benar, sebagai mana yang telah diatur oleh Allah Swt, bahwa baik buruknya kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator lainnya,

¹³⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 17.

¹³⁷ Nalim, *Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam*, vol xx,2 oktober 2015, h. 10.

melainkan sejauh mana seseorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.

Prinsip manajemen Islam segala sesuatu yang harus dilakukan rapi, benar, tertib dan teratur arah pekerjaannya yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya harus transparan yang merupakan awal perkataan yang disenangi Allah SWT. Seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu tanpa transparan tanpa adanya suatu penelitian, kecuali yang bersifat darurat. Dimana Allah telah mencintai perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ahs-Shaff; 4 surat Al-Haysr:¹³⁸

1. Surah Ahs-Shaff ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.¹³⁹

2. Dan surah Al-Haysr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁴⁰

Berkaitan dengan hakekat dan realitas manajemen syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan atau persoalan agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya, maka

¹³⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

¹³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 805

¹⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 799

hal ini menderivasikan adanya prinsip-prinsip manajemen syariah yang meliputi: nilai *shiddiq* (jujur), *Thabliq* (komunikatif), *Amanah* (dapat dipercaya) dan *Fathanah* (cerdas) akan mampu menjadikan travel haji/umrah menjadi kepercayaan masyarakat sekitar.

1. *Shiddiq* (Jujur)

Shiddiq artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar sejalan dengan ucapannya. Kejujuran bagi seorang manajer merupakan hal yang prinsipil, yang harus ditegakkan sehingga semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Kejujuran adalah suatu kriteria yang selalu ada pada berbagai teori kepemimpinan, karena apabila tidak jujur para pemimpin melakukan sebuah korupsi.

Hal ini berkaitan erat dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip Transparansi (Keterbukaan). Di mana dalam prinsip GCG yaitu Transparansi, pemberian informasi kepada atasan ataupun kepada jamaah haruslah sesuai dengan apa yang sebenarnya.

Prinsip *shiddiq* tidak sepenuhnya dapat ditemukan dalam prinsip GCG. Prinsip GCG yang mengandung prinsip *shiddiq* di dalamnya hanya bisa ditemukan dalam prinsip Transparansi saja.

Wujud nyata transparansi lainnya adalah keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register serta terbuka menerima peran serta masyarakat. Dalam hal ini memberikan informasi mengenai hal-hal yang ada di PT. An-Nur Maarif kepada masyarakat sekitar secara *Shiddiq* (Jujur). Penerapan sikap transparansi yang bersifat *Shiddiq* pada PT. An-Nur Maarif dapat dilihat dari penyiaran pelayanan Travel PT. An-Nur Maarif pada salah satu siaran televisi local yaitu Mitra TV. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut:

“oohh an-nur travel, itu yang sering muncul e di mitra TV. Bagus pelayanannya itu nakasi liat ki secara bagaimana kegiatan-kegiatan e kalau naik ki haji, biar manasik haji e nakasi liat tokki juga disitu”¹⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sikap *shiddiq* yang diterapkan oleh PT. An-Nur Travel berdasarkan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip Transparansi (Keterbukaan) yakni penyampaian informasi kepada masyarakat melalui siaran TV. Selain itu sikap *shiddiq* dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip Transparansi (Keterbukaan) dapat dilihat dari hasil wawancara sebelumnya dengan Fajar Hari Sandy Ilyas, customer service PT. An-Nur Travel yang menyatakan bahwa:

“calon nasabah dijelaskan terlebih dahulu mengenai pilihan paket dan fasilitas yang akan dinikmati berdasarkan paket yang dipilih oleh calon jamaah”¹⁴²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai *Shiddiq* pada PT. An-Nur Maarif yang telah diterapkan dalam konsep *Good Corporate Governance* dapat ditemukan dalam prinsip transparansi. Sedangkan di prinsip lain tidak ditemukan secara rinci nilai *Shiddiq* didalamnya.

2. *Tabligh* (Komunikatif)

Dalam manajemen syariah, komunikasi (*Tabligh*) menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial menuju tercapainya tujuan yang diharapkan. Pentingnya komunikasi dalam manajemen syariah menuntut komunikasi tersebut disampaikan dengan tepat. Prinsip *Tabligh* yang diterapkan oleh PT. An-Nur Maarif dapat pula dilihat dari segi pelayannya saat pelaksanaan haji

¹⁴¹ Drs. Mahyuddin, “Warga Sidrap,” *Wawancara*, Baranti, 22 Mei 2021

¹⁴² Fajar Hari Sandy Ilyas,” Customer Service PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene, 18 Mei 2021.

dan umrah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Erik Pisco Arishandy selaku karyawan PT. An-Nur Maarif di Divisi umrah haji sebagai berikut:

“ust. Yang bertugas untuk mendampingi jamaah ketika pemberangkatan haji bertugas untuk membimbing dan selalu berkomunikasi dengan jamaah seperti halnya menanyai kondisi atau kesehatan jamaah, mengingatkan jadwal kegiatan.”¹⁴³

Penyampaian Erik Pisco Arishandy, dibenarkan oleh H. Lambogo selaku jamaah PT. An-Nur Maarif sebagai berikut:

“bagus memang pelayanannya An-Nur Maarif, selalu ki na ingatkan apa lagi yang akan dilakukan selanjutnya disana. Na ingatkan ki juga tentang doa-doa yang bagus disebut disana, biar makan tag sama kesehatan ta na perhatika ki juga.”¹⁴⁴

Dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG), *Tabligh* (Komunikasi) juga merupakan factor terpenting. Seperti halnya dalam penyampaian informasi dalam hal ini prinsip transparansi (keterbukaan) dimana komunikasi merupakan penghubung bagi PT. An-Nur Maarif dengan masyarakat. *Thabliq* berperan penting dalam setiap aspek konsep *Good Corporate Governance* (GCG), mulai dari prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip professional, prinsip responsibility dan prinsip keadilan. Di mana *Tabligh* merupakan penghubung antara pengurus dengan atasan, maupun pengurus dengan calon jamaahnya.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, menilai *Tabligh* terdapat di semua aspek *Good Corporate Governance* (GCG), dalam prinsip transparansi di PT. An-Nur Maarif *thabliq* diterapkan dengan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada jamaah. Adapun dalam prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari komunikasi antara karyawan dan pimpinannya mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Begitu pula dengan professional, nilai *Tabligh* berperan sebagai sarana tanggung jawab sosial antara jamaah, masyarakat

¹⁴³ Erik Pisco Arishandy” Divisi Umrah Haji PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene, 3 Mei 2021.

¹⁴⁴ H. Lambogo, Jamaah PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Rappang, 24 Mei 2021

maupun karyawan. Intinya setiap kegiatan diperlukan komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya.

3. *Amanah* (dapat dipercaya)

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.

Dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip amanah dapat ditemui dalam prinsip akuntabilitas. Di mana tanggung jawab karyawan dengan job descriptionsnya masing-masing. Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak PT. An-Nur Maarif sebagai berikut:

“untuk kejelasan tanggungjawab disini sudah kita sesuaikan di bidangnya masing-masing, misalnya pengurus lembaga akan mempertanggungjawabkan pada setiap masing-masing yang telah di delegasikan oleh pimpinan Lembaga, tetapi kami tetap saling membantu misalkan dibagian visa membantu bagian pengaturan kamar hotel, akan tetapi dia harus memfokuskan dulu di pekerjaannya masing-masing. Kemudian apabila ada karyawan yang melakukan sebuah kesalahan akan dikenakan sanksi yaitu berupa teguran.”¹⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa prinsip manajemen syariah yaitu amanah diterapkan oleh PT. An-Nur Travel dalam hal prinsip akuntabilitas. Artinya setiap individu atau pegawai mempertanggung jawabkan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Prinsip amanah oleh PT. An-Nur Maarif pada konsep *Good Corporate Governance* (GCG), tidak hanya dapat ditemui dalam prinsip akuntabilitas, tetapi dapat juga ditemui dalam prinsip responsibility. Di mana prinsip responsibility bukan hanya amanah karyawan pada PT. An-Nur Travel tetapi

¹⁴⁵ Fajar Hari Sandy Ilyas, "Customer Service PT. An-Nur Maarif," Wawancara, Pangkajene, 18 Mei 2021.

juga sikap amanah PT An-Nur Travel ke pada para jamaahnya. Seperti halnya sikap amanah yang diterapkan PT. An-Nur travel terhadap jamaahnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh pihak PT. An-Nur Travel berikut:

“pertanggungjawaban oleh pihak penyelenggara terhadap jama’ah kita bisa lihat dari segi harga paket, dan menyediakan fasilitas serta pelayanan yang ditawarkan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, dan proses admindrasinya yang dilakukan cepat, tidak mempersulit anggotanya sehingga lebih nyaman dan terbuka”,¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap amanah (bertanggung jawab) yang diterapkan PT. AN-Nur Travel berkaitan erat pula dengan prinsip responbility pada konsep *Good Corporate Governance*. Adapun sikap amanah (bertanggung jawab) dapat dikaitkan pula dengan prinsip Profesional dalam konsep *Good Corporate Governance*. Di mana pada prinsip professional dapat dinilai bahwa PT. An-Nur Maarif merupakan travel yang amanah (dapat dipercaya) terbukti meskipun masa pandemic Covid-19 jamaah tetap percayakan dananya kepada PT. An-Nur Maarif. Sebagaimana hasil wawancara dengan karyawan sebagai berikut:

“jamaah tetap mendaftarkan diri menjadi calon jamaah PT. An-Nur Maarif meski pandemic. Karena jika sudah diizinkan maka kita akan segera memberangkatkan jamaah sesuai prosedur yang berlaku.”¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa PT. An-Nur Maarif tetap menjadi kepercayaan perjalanan haji/umrah masyarakat. Hal ini dikarenakan PT. An-Nur Maarif dikenal sebagai travel Haji/ Umrah yang professional dibidangnya.

4. *Fathanah* (Cerdas)

Jadi seorang manajer harus cerdas dan mampu berfikir dalam menangani dan memecahkan permasalahan dalam mencapai tujuan organisasi dengan

¹⁴⁶ Fajar Hari Sandy Ilyas,” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif,” Wawancara, Pangkajene, 18 Mei 2021.

¹⁴⁷ Fajar Hari Sandy Ilyas,” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif,” Wawancara, Pangkajene, 18 Mei 2021.

mewujudkan kondisi yang rasional, efektif dan efisien. Apalagi ditengah pandemic seperti sekarang ini sikap cerdas sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan tidak terkecuali PT. An-Nur Maarif.

Sejak Pemerintah Arab Saudi mengumumkan penundaan pelaksanaan umrah beberapa bulan yang lalu kami manajemen PT. An-Nur Maarif dalam hal ini An-Nur Travel dan An-Nur Travel Founducion memncoba untuk tetap eksis di berbagai media baik media social maupun dalam bentuk pelayanan kemanusiaan. Hal ini dianggap cukup penting untuk memberikan edukasi kepada jamaah dan calon jamaah kami bahwasanya An-Nur Travel tetap ada dan akan terus ada untuk ummat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara berikut:

“kebijakan pemerintah di masa pandemi yang mengharuskan seluruh perkantoran tutup untuk sementara tetap dijalankan namun konsep Work From Home tetap kami lakukan guna memberikan rasa aman bagi jamaah dan calon jamaah. Kenapa kami tetap eksis di tengah kondisi yang serba sulit seperti ini? Karena sebagai wadah bagi tamu Allah kami ingin sekedar memberikan keyakinan penuh kepada masyarakat bahwa pilihan mereka pada kami sebagai travel umrah/haji tidaklah salah. Bukannya ingin membandingkan dengan yang lainnya. Namun coba kita perhatikan selama mewabahnya virus covid-19 ini, apa ada travel umrah yang tetap menjalankan fungsinya sebagai pelayan tamu Allah setidaknya yang mampu melayani hamba-hamba Allah yang sedang membutuhkan. Konsistensi kami tetap kami pegang teguh karena ini adalah bagian dari amanah pekerjaan kami. Dan pada akhirnya nanti jika Allah mengizinkan, Insya Allah Umrah bias kembali dibuka maka kami ingin menyampaikan kepada calon jamaah kami; Selamat Anda sudah berada pada pilihan yang tepat. Anda tak perlu ragu karena anda bukan orang yang nekat akan tetapi anda semua adalah jamaah yang cerdas.”¹⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa PT. An-Nur Maarif merupakan Travel perjalanan Haji/Umrah yang *Fathanah* (Cerdas). Hal ini dapat diketahui dengan tetap eksisnya PT. An-Nur Maarif pada media social online maupun pelayanan masyarakat di tengah pandemi. Hal ini berkaitan erat dengan konsep *Good Corporate Governance* pada

¹⁴⁸ Fajar Hari Sandy Ilyas,” *Customer Service* PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene, 18 Mei 2021.

prinsip Transparansi dan prinsip Kewajaran. Di mana dalam prinsip transparansi dapat dilihat dari sikap *fathanah* (cerdas) yang segera diambil ketika pandemi covid-19 mulai mewabah. Di mana PT. An-Nur Maarif tetap mengikuti anjuran pemerintah tanpa mengabaikan hak dari para jamaahnya. Adapun dalam prinsip kewajaran dapat dilihat dari tindakan pengurus PT. An-Nur Maarif yang tidak memaksakan diri memberangkatkan jamaahnya di tengah pandemic covid-19. Di masa pandemic covid-19 PT. An-Nur Maarif Sidrap juga melakukan beberapa aktivitas social, seperti halnya yang dilakukan oleh relawan ungu (sebutan untuk relawan PT. An-Nur Maarif) yakni membagi-bagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Kegiatan ini dibenarkan oleh Baharuddin Dirwan selaku anggota relawan ungu sebagai berikut:

“relawan ungu pada saat bulan puasa kemarin sempat membagikan beberapa bahan kebutuhan pokok kepada para pengemudi becak motor dan ojek di Kota Pangkajene, ini bukan yang pertama kami sering melakukan aksi social seperti itu, agar masyarakat lebih mengenal kami. Kegiatan social kami juga kami upload di media social seperti Facebook sebagai ajang promosi”¹⁴⁹

Hal ini membuktikan bahwa sikap cerdas PT. An-Nur Maarif bukan hanya dalam pelayanan haji/umrah saja tetapi juga dengan pelayanan umat.

Baharuddin Dirwan juga menambahkan sebagai berikut:

“selain aksi social seperti itu, kita juga melakukan aksi kurban Bersama, jadi kita mengumpulkan jamaah yang ingin bergabung untuk berkorban dengan kami nanti kami yang melakukan kurban secara Bersama dan membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.”¹⁵⁰

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai nilai manajemen syariah yang diterapkan dalam *Good Corporate Manajemen*, peneliti dapat mengevaluasi penerapan *good corporate governance* dalam analisis manajemen syariah pada PT. An-Nur Maarif kabupaten Sidrap sebagai berikut:

¹⁴⁹ Baharuddin Dirwan, “Relawan Ungu PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene 3 Juli 2021.

¹⁵⁰ Baharuddin Dirwan, “Relawan Ungu PT. An-Nur Maarif,” *Wawancara*, Pangkajene 3 Juli 2021.

a) Transparansi

Nilai manajemen syariah yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* bagian prinsip transparansi yaitu nilai *shiddiq* (kebenaran), nilai *tabligh* (komunikasi), dan *fathanah* (cerdas).

Nilai *Shiddiq* terdapat pada kebenaran informasi yang disampaikan PT. An-Nur Maarif kepada para calon jamaahnya. Adapun nilai *Tabligh* terdapat pada penyampaian komunikasi antara PT. An-Nur Maarif dengan jamaahnya. Dan nilai *Fathanah* dilihat dari kecerdasannya dalam menyampaikan informasi kepada calon jamaah. Utamanya di masa pandemic covid-19 seperti saat ini.

b) Akuntabilitas

Nilai manajemen syariah yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* bagian prinsip akuntabilitas yaitu nilai nilai *Tabligh* (komunikasi), dan *Amanah*. Nilai *Tabligh* dilihat dari komunikasi antara karyawan dengan karyawan lainnya dalam melaksanakan tugasnya agar tidak ada kesalahpahaman antar karyawan PT. An-Nur Maarif. Adapun nilai *Fathanah* dapat dilihat dari setiap solusi yang diambil karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

c) Profesional

Nilai manajemen syariah yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* bagian prinsip profesional yaitu nilai *Tabligh* (komunikasi), dan *Amanah*. Nilai *Tabligh* dapat dilihat dari kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada calon jamaah agar tidak ada kesalah pahaman antara pihak PT. An-Nur Maarif dengan calon jamaahnya. Selain nilai *Tabligh* yang terdapat di prinsip GCG

ini, nilai *Amanah* juga sangat berperan penting dalam menjaga kepercayaan jamaah terhadap PT. An-Nur Maarif.

d) Responsibility

Nilai manajemen syariah yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* bagian prinsip transparansi yaitu nilai *Tabligh* (komunikasi), dan *Amanah*. Nilai ini berperan penting dalam amanah disertai komunikasi yang baik agar setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PT. An-Nur Maarif dapat terlaksana dengan baik. prinsip responsibility bukan hanya amanah karyawan pada PT. An-Nur Travel tetapi juga sikap amanah PT An-Nur Travel ke pada para jamaahnya.

e) Fairness

Nilai manajemen syariah yang terkandung dalam *Good Corporate governance* bagian prinsip fairness yaitu nilai *Tabligh* (komunikasi), dan *Fathanah* (cerdas). Nilai fathanah dan tabligh dapat dilihat dari tindakan pengurus PT. An-Nur Maarif yang tidak memaksakan diri memberangkatkan jamaahnya di tengah pandemic covid-19. PT. An-Nur Maarif mampu menyampaikan dengan baik informasi kepada jamaah mengenai pembatalan pemberangkatan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* dalam analisis manajemen syariah pada PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai *Shiddiq*, *Tabligh*, *Amanah* dan *Fathanah* diterapkan dalam *Good Cooperative Governance*. Setiap prinsip GCG mengandung nilai manajemen syariah didalamnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan Analisa data dengan menjelaskan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan Analisa data yang diperoleh oleh peneliti yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (pemaparan) dengan menganalisa data yang telah peneliti kumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi selama peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa secara umum *Good Corporate Governance* sebagai salah satu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengolahan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹⁵¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa tata kelola organisasi secara baik dapat dilihat dari dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal organisasi lebih focus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalanya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas sedangkan eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan tujuan organisasi.

Teori diatas telah banyak menggambarkan tentang GCG, dan disini secara umum analisis prinsip-prinsip utama penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. An-Nur Maarif Sidrap yaitu sebagai berikut:

a. Transparansi (transparency)

¹⁵¹ Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaja, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, h. 8.

Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan terhadap perusahaan.¹⁵² Dalam prinsip ini sangat diperlukan agar kegiatan bisnis berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan stakeholder. Adapun prinsip transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.¹⁵³ Semua pihak dapat mengetahui informasi atau kebijakan perusahaan dan memberikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang berguna bagi kemajuan perusahaan. Serta Visi dan Misi perusahaan disampaikan kepada semua anggota dan masyarakat dan memiliki peraturan perusahaan yang tertulis.

Dalam hal ini PT. An-Nur Maarif mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya maupun stakeholder lainnya.

Prinsip transparansi pada PT. An-Nur Maarif menunjukkan bahwa PT. An-Nur Travel telah memenuhi beberapa indikator dari konsep *Good Corporate Governance* prinsip transparansi secara rinci sebagai berikut:

a) Kemudahan akses internet.

Pada PT. An-Nur Maarif prinsip transparansi dalam kemudahan akses internet dijalankan oleh instansi. Di mana terdapat banyak akses internet yang dapat di gunakan untuk mengetahui ataupun mendapat informasi mengenai PT. An-Nur Maarif. Bukan hanya dalam media elektronik, seperti iklan dan siaran aktivitas di siaran televisi local, pencarian

¹⁵² Siti Nurhasanah, Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Persero, jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No 3 2010.

¹⁵³ Putri Indar Dewi, Penerapan *Good Corporate Governance* Di Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Al-Tsarwah Program Studi Ekonomi Syariah Vol. 3 No.2 Desember 2020. h. 9

informasi mengenai PT. An-Nur Maarif di google yang mudah diakses, serta berbagai informasi kegiatan dan pemberitahuan di media sosial seperti facebook.

b) Ketersediaan informasi.

Good Corporate Governance dalam prinsip transparansi bagian ketersediaan informasi berjalan dengan baik. Di lihat dari kemudahan akses informasi di internet oleh calon jamaah maupun karyawan PT. An-Nur Maarif. Selain penyampaian informasi melalui sosial media, PT. An-Nur Maarif juga menyediakan informasi melalui brosur-brosur online maupun offline serta pelayanan informasi secara langsung di kantor PT. An-Nur Maarif.

c) Kerahasiaan Informasi

Setiap perusahaan memiliki rahasia informasi, begitu pula dengan PT. An-Nur Maarif. Kerahasiaan informasi PT. An-Nur maarif terdapat pada masalah keuangan PT. An-Nur Maarif. Di mana pengelolaan dana tidak di ekspos secara luas di hadapan masyarakat. Jadi, PT. An-Nur maarif juga melaksanakan kerahasiaan informasi dalam *Good Corporate Governance*.

d) Penyampaian kebijakan

Pada indikator prinsip transparansi ini, PT. An-Nur Maarif tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Ada kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat ada yang tidak. Kebijakan yang disampaikan di masyakat berupa kebijakan ketika ada pembatalan pemberangkatan seperti di masa pandemic covid-19 saat ini maupun kebijakan mengenai paket pembayaran yang ingin di ambil oleh nasabah. Adapun kebijakan yang tidak di sampaikan secara umum oleh pihak PT. An-Nur Maarif yakni

mengenai kebijakan penerimaan karyawan/staff PT. An-Nur Maarif. Di mana hanya pihak PT. An-Nur Maarif yang diberikan informasi.

a. Visi dan Misi Perusahaan

PT. An-Nur Maarif dalam mencapai tujuannya juga melaksanakan visi dan misi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya visi misi yang terpasang sebagai pedoman PT. An-Nur Maarif dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan deskripsi diatas, bahwa Prinsip transparansi dalam PT. An-nur Maarif telah menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Namun ada beberapa prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan yakni dalam hal penyampaian kebijakan. Prinsip transparansi yang tidak terpenuhi pada hasil wawancara peneliti bahwa PT. An-Nur Maarif dalam merekrutmen pegawai tidak dilakukan secara terbuka. Ini disebabkan pihak PT. An-Nur Maarif memiliki kriteria sendiri. Sedangkan keterbukaan yang telah diterapkan oleh PT. An-Nur Maarif adalah pihak penyelenggara terhadap jama'ah dalam hal ini memberikan informasi mengenai masalah pelayanan, masalah pesawat, masalah harga, serta masalah perlengkapan pribadi calon jama'ah haji dan umrah yang meliputi password, vaksin, dan surat muhrim semuanya sudah dijelaskan dengan tepat dan benar.

Keterbukaan informasi dari PT. An-Nur Maarif dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi ini dapat menunjukkan kepatuhan perusahaan pada ketetapan aturan KNKG, dimana perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, selain itu prinsip keterbukaan

yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Serta penerapan dan pengelolaan *Good Corporate Governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk dapat memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Oleh karena itu baik perusahaan public maupun tertutup harus memandang bahwa GCG bukan sebagai aksesories, melainkan sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.¹⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, konsep *Good Corporate Governance* yang diterapkan di PT. An-Nur Maarif juga selalu memperhatikan sikap manajemen syariahnya. Di mana dalam setiap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* PT. An-Nur Maarif tetap mengaitkan erat dalam kajian Islam. Seperti halnya dalam prinsip transparansi yang diterapkan PT. An-Nur Maarif yang penyampaian informasinya kepada jamaah dilakukan secara jujur. Artinya ada 2 prinsip manajemen Syariah yang telah diterapkan dalam prinsip transparansi ini yaitu *Shiddiq* (Jujur) dan *Thabliq* (menyampaikan kebenaran). Selain kedua prinsip manajemen syaiah tersebut, prinsip transparansi yang diterapkan PT. An-Nur Maarif juga menerapkan sikap *Fathanah* yang berarti penyampaian informasi yang jujur dan sesuai kebenaran tersebut dilakukan secara cerdas dan inovatif. Seperti halnya penyampaian melalui media social ataupun melalui penyiaran televisi.

¹⁵⁴ Novita Wulan Sari, dkk, Penerapan Good Corporate Governance Di PT. Telkom Malang, Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Adminidrasi Universitas Brawijaya, Malang Vol 2, No. 4 659.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, bahwa konsep *Good Corporate Governance* yang diterapkan PT. An-Nur Maarif dalam prinsip Transparansi sesuai dengan prinsip manajemen Syariah yakni *shiddiq* dan *Thabliq*.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap organ setiap pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.¹⁵⁵ Dalam hal ini PT. An-Nur Maarif dituntut melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan Lembaga sesuai fungsi dan dalam praktek manajemen semua yang terlibat dalam organisasi dari masing-masing pengurus harus dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa keragu-raguan pada anggota PT. An-Nur Maarif dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Prinsip akuntabilitas pada PT. An-Nur Maarif Sidrap menunjukkan bahwa terdapat indikator yang telah terpenuhi secara rinci sebagai berikut:

a) Perincian Tugas dan Tanggung Jawab

Setiap karyawan di PT. An-Nur Maarif diberikan rincian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap individu memiliki tugas masing-masing sesuai dengan jabatan mereka. Mulai dari pimpinan, receptionist, petugas haji/umrah, dan lain sebagainya. Setiap dari mereka memiliki tanggung jawab sendiri terhadap tugas dan jabatannya dalam PT. An-Nur Maarif.

b) Kompetensi yang Sesuai

Prinsip *Good Corporate Governance* pada indikator ini dilaksanakan oleh PT. An-Nur Maarif. Hal ini dapat dilihat dari pembagian tugas dan

¹⁵⁵ Djojok Dwiridotjahjono, Penerapan *Good Corporate Governance*: Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia, Jurnal: Adminidrası Bisnis Vol No. 2, UPN Fisip Jawa Timur, 2009.

tanggung jawabnya. Di mana yang berhak sebagai pendamping haji/umrah adalah ustad/ulama yang berkompeten dalam membimbing jamaah.

c) Sistem Pengendalian

System pengendalian yang dilaksanakan oleh PT. An-Nur Maarif yaitu mengenai kedisiplinan karyawan maupun petugas pelayanan haji/umrah.

d) Pengukuran Kinerja

Kinerja karyawan PT. An-Nur Maarif dilakukan dengan cara melihat hasil akhir dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab karyawan maupun petugas haji. Selain itu kinerja karyawan dan petugas haji juga dinilai dari kepuasan jamaah dalam pelayanan karyawan ataupun petugas haji/umrah.

e) Pelaksanaan tugas sesuai pedoman

PT. An-Nur Maarif juga melaksanakan SOP dalam setiap karyawannya. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan SOP yang telah berlaku.

Dalam prinsip pertanggungjawaban PT. An-Nur Maarif harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu PT. An-Nur Maarif harus dikelola secara benar dan terukur, serta sesuai dengan kepentingan PT. An-Nur Maarif dengan tetap memperhitungkan kepentingan shareholders dan stakeholders. Penerapan prinsip akuntabilitas pada PT. An-Nur Maarif dilakukan sesuai dengan kepentingan karyawan di bidangnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa PT. An-Nur Maarif telah menerapkan konsep *Good Corporate Governance* prinsip akuntabilitas. Di mana setiap karyawan telah diberikan job deskripsi masing-masing sesuai dengan bidangnya.

Konsep *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh PT. Annur Maarif prinsip akuntabilitas berkaitan erat pula dengan prinsip manajemen Syariah yaitu Penerapan prinsip akuntabilitas ini dilakukan secara *Tabligh* (komunikatif) antara karyawan dengan atasan di PT. An-Nur Maarif sehingga komunikasi antara keduanya dapat terjalin secara baik demi mewujudkan kelancaran kinerja dalam Lembaga tersebut. Selain prinsip *Tabligh* (komunikatif), prinsip akuntabilitas juga menerapkan prinsip *Amanah* (dapat dipercaya). Prinsip amanah yang diterapkan oleh PT. An-Nur Travel dalam hal prinsip akuntabilitas dimana setiap individu atau pegawai mempertanggung jawabkan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing.

c. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban (Responsibility) perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁶ Serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka Panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Citizen*.¹⁵⁷ Adapun peraturan yang termasuk disini yang berkaitan dengan peraturan surat izin biro perjalanan haji/umrah dari Kantor Kepala Kementerian Agama.

Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang

¹⁵⁶Siti Nurhasanah, Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Persero, jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No 3 2010.

¹⁵⁷ Putri Indar Dewi, Penerapan *Good Corporate Governance* Di Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Al-Tsarwah Program Studi Ekonomi Syariah Vol. 3 No.2 Desember 2020.

menyadari akan adanya tanggungjawab social, tanggungjawab lingkungan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung tinggi etika dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Dalam hal ini, prinsip pertanggungjawaban pada PT. An-Nur Maarif menunjukkan bahwa telah dilaksanakan dengan baik sebagai berikut:

a) Kepatuhan Hukum

PT. An-Nur Maarif menjalankan indikator Good Corporate Governance ini dalam perusahaannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya izin operasional dari kementerian agama yang dipegang oleh PT. An-Nur Maarif dan izin tersebut masih berlaku hingga kini saat peneliti melaksanakan penelitiannya.

b) Tanggung Jawab Sosial

PT. An-Nur Maarif Sebagai perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. PT. An-Nur Maarif tetap menjaga tanggung jawab sosialnya dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh relawan ungu (relawan PT. An-Nur Maarif) berupa pembagian sembako di masa pandemic covid-19 maupun pembagian makanan gratis kepada tukang becak.

c) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ini dilaksanakan oleh PT. An-Nur Maarif. Hal ini dapat dilihat dari pengimputan data calon jamaah yang dilakukan secara rinci supaya tidak ada kesalahan data identitas maupun kesalahan informasi ke calon jamaah.

Berdasarkan penjelasan tersebut Konsep *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh PT. An-Nur Maarif dalam prinsip responsibility dalam hal kepatuhan hukum sudah diterapkan dengan baik dimana dapat kita lihat dari

adanya surat izin resmi dari Kementrian Agama Kabupaten Sidrap kepada biro perjalanan haji/umrah. Selain itu pada indikator tanggung jawab social kepada masyarakat juga telah terpenuhi. prinsip pertanggungjawaban di PT. An-Nur Maarif sudah diterapkan dengan baik dimana pihak penyelenggara telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaa'ah karena apabila jama'ah telah merasakan kualitas pelayanan sesuai harapan dapat menimbulkan cerita positif dari jamaah tersebut dan itu tentu sangat berpengaruh terhadap travel maupun mitra kerja perusahaan, serta pihak lembaga telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum yang telah berlaku.

Konsep *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh PT. Annur Maarif prinsip responsibility berkaitan erat pula dengan prinsip manajemen Syariah yaitu *thabliq* (komunikatif) dan amanah (dapat dipercaya). prinsip responsibility bukan hanya amanah karyawan pada PT. An-Nur Travel tetapi juga sikap amanah PT An-Nur Travel ke pada para jamaahnya.

d. Professional (professional)

Prinsip professional yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip ini merupakan korporasi yang sehat¹⁵⁸ Dalam pelaksanaan operasionalnya PT. An-Nur Maarif tidak diperkenankan mendapat pengaruh dari pihak manapun yang berarti dijalankan secara professional.

Prinsip profesional dalam PT. An-Nur Maarif harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuasaan yang tepat, sehingga tidak ada organ perusahaan yang akan mendominasi organ lainnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Independensi mencerminkan sikap tidak memihak

¹⁵⁸ Siti Nurhasanah, Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Persero, jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No 3 2010

serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.

Dalam hal ini, Prinsip professional pada PT. An-Nur Maarif menunjukkan bahwa telah dilakukan dengan baik sebagai berikut:

a) Dominasi dan Pengaruh

PT. An-Nur Maarif merupakan salah satu travel haji/umrah yang banyak digunakan oleh calon jamaah. Dominasi dan pengaruh PT. An-Nur Maarif dikalangan masyarakat Sidrap sangat bagus. Dilihat dari peningkatan jamaah tiap tahun dan banyaknya jumlah pemberangkatan jamaah tiap tahunnya.

b) Pelaksanaan Tugas sesuai Tanggung Jawab

Setiap karyawan ataupun pendamping perjalanan haji/umrah PT. An-Nur Maarif melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja PT. An-Nur Maarif termasuk perusahaan yang mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesional. Dilihat dari lamanya pendirian travel tersebut dan kepercayaan masyarakat terhadap biro perjalanan tersebut serta berbagai penghargaan yang telah dicapai.

PT. An-Nur Maarif yang tetap menjalankan prinsip manajemen Syariah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti halnya tertanamnya prinsip *Tabligh* (komunikatif) dan prinsip *Amanah* (dapat dipercaya) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bukti keprofesionalan PT. An-Nur Maarif dapat dilihat dari segi kepercayaan jamaahnya dari tahun ke tahun serta dari penghargaan-penghargaan yang berhasil diraih oleh PT. An-Nur Maarif.

e. Kewajaran (Fairness)

Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memengaruhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran dapat diwujudkan antara membuat peraturan kepentingan minoritas, membuat corporate conduct dan kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan baik orang dalam, self diadling dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggungjawab direksi dan komite, termasuk didalamnya sistem remunerasinya menyajikan informasi secara wajar dan mendepankan *equal job opportunity*.¹⁵⁹

Dalam prinsip kewajaran (fairness) PT An-Nur Maarif dalam melaksanakan kegiatannya harus mempertimbangkan kepentingan shareholders dan stakeholders lainnya. Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini, ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.

Prinsip kewajaran pada PT. An-Nur Maarif menunjukkan bahwa telah dilaksanakan dengan baik sebagai berikut:

a) Kesempatan Berpendapat

PT. An-Nur Maarif melaksanakan indikator ini dalam perusahaannya. Hal ini dapat dilihat dari gagasan dan pendapat karyawan yang diterima mengenai proses periklanan PT. An-Nur Maarif di media sosial.

b) Kesempatan Kompensasi

¹⁵⁹ Siti Nurhasanah, Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Persero, jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No 3 2010.

Indikator ini dijalankan oleh PT. an-Nur kepada karyawannya terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, terkadang jamaah juga mendapatkan kompensasi pengembalian dana apabila calon jamaahnya meninggal dunia sebelum pemberangkatan berupa pengembalian dana ataupun penggantian pemberangkatan.

c) Kesempatan Karyawan

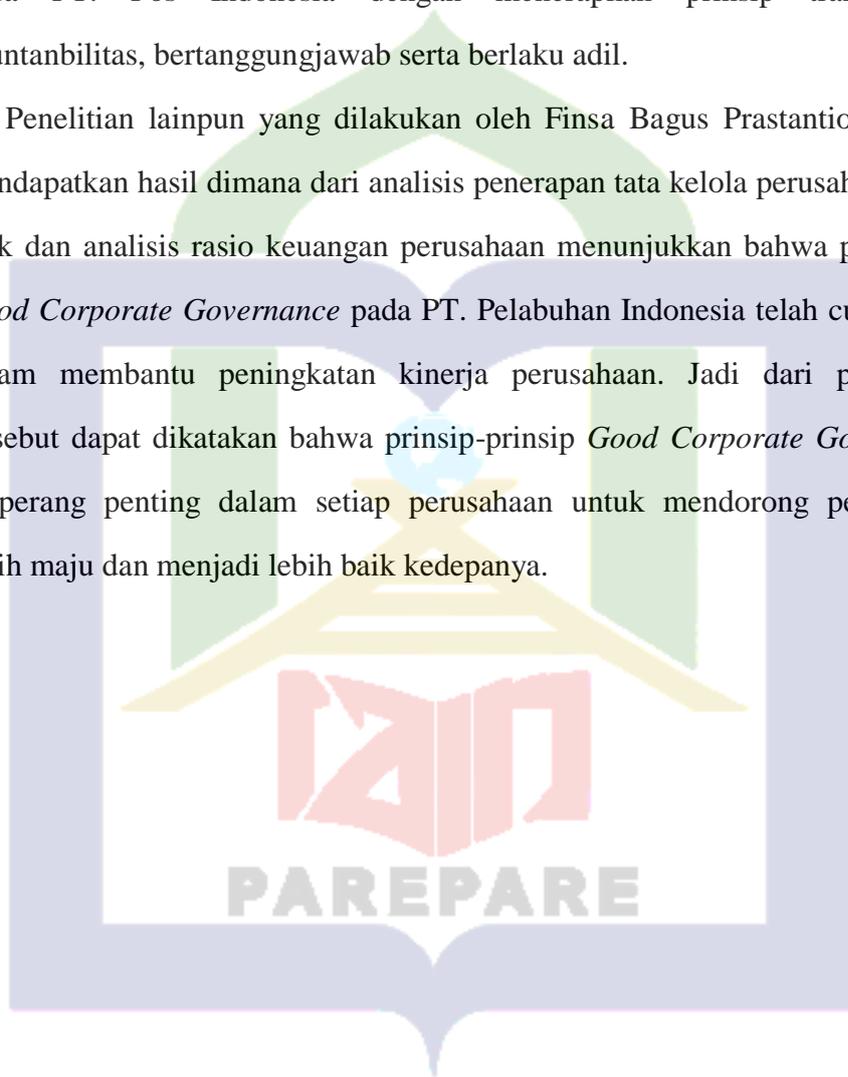
Indikator ini terlaksana dengan diberikannya kesempatan ke setiap karyawan untuk mengeluarkan pendapatnya dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kreasinya sendiri tanpa menyalahi aturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, PT. An-Nur Maarif dalam konsep *Good Corporate Governance* prinsip Kewajaran dilakukan dengan baik. Dimana karyawan yang menyalahi tugasnya akan diberikan peringatan. Dan apabila ada karyawan yang mempunyai pemikiran yang cemerlang ditampung dan disalurkan dengan baik. Seperti halnya pada pandemi covid-19 PT. An-Nur Maarif menerima gagasan dari karyawannya mengenai penyebaran informasi melalui media social maupun melalui siaran televisi. Pemikiran yang Cerdas ini sesuai dengan prinsip manajemen Syariah yaitu *fathanah* (cerdas). Prinsip *Fathanah* yang diterapkan PT. An-Nur Maarif di masa pandemi covid-19 merupakan solusi yang cerdas yang diambil dalam menghadapi perubahan global yang terjadi saat ini.

Kemudian mengenai hasil yang telah didapatkan oleh peneliti dimana penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap maka hasil ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Nila Elly Halimatusadiah, dari hasil yang diungkapkan dalam penelitian tersebut

dimana penerapan *Good Corporate Governance* sudah terlaksana dengan baik, dimana hasil menyatakan bahwa unsur-unsur *Good Corporate Governance* dapat mengoptimalkan pelaksanaan sistem akuntansi yang ada pada PT. Pos Indonesia dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab serta berlaku adil.

Penelitian lainpun yang dilakukan oleh Finsa Bagus Prastantio, Endang mendapatkan hasil dimana dari analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan analisis rasio keuangan perusahaan menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pelabuhan Indonesia telah cukup baik dalam membantu peningkatan kinerja perusahaan. Jadi dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berperang penting dalam setiap perusahaan untuk mendorong perusahaan lebih maju dan menjadi lebih baik kedepanya.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT An-Nur Maarif di Kabupaten Sidrap sudah terlaksana, Namun ada indikator dari prinsip Transparansi yang belum sepenuhnya terlaksana yakni penyampaian kebijakan dalam hal perekrutan karyawan PT. An-Nur Maarif. Adapun komponen indikator prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu *Transparansi, Akuntabilitas, profesional, bertanggungjawab, dan kewajaran* sudah terlaksana dengan baik. Salah satu bukti dari terlaksananya prinsip *Good Corporate Governance* yaitu dalam hal menyampaikan informasi serta karyawan telah disiplin dan bertanggungjawab terhadap setiap tugas yang diteloh diberikan. hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* salah satunya adalah prinsip *Akuntability*.
2. Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Analisis Manajemen Syariah dapat disimpulkan bahwa PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap telah menerapkan *Good Corporate Governance* dalam kinerja tata kelolanya dengan menerapkan empat unsur STAF yaitu *Shidiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah* unsur ini merupakan prinsip Islam yang mendukung terlaksananya *Good Corporate Governance* yang mana merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai Islam dalam manajemen yang dilaksanakan secara professional.

B. Implikasi

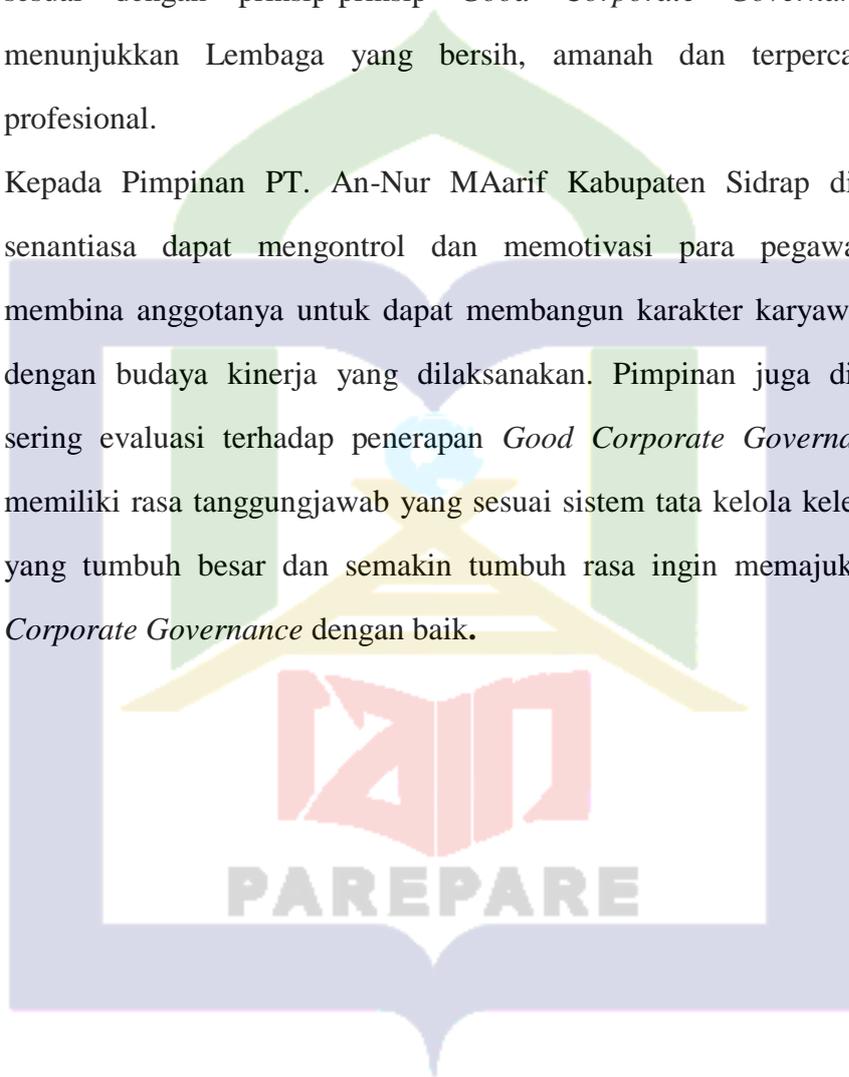
Berdasarkan kesimpulan penelitian Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap telah dilakukan memiliki implikasi yang sangat tinggi. Adapun implikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Profesional, Bertanggungjawab, dan Kewajaran. Prinsip ini dapat diterapkan di setiap instansi khususnya usaha biro haji dan umrah dengan menerapkan prinsip ini dapat membantu pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik.
2. Dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen Syariah yang mendukung terlaksananya *Good Corporate Governance* sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam yang meliputi *Shidiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah* , maka akan memberikan peluang besar terhadap minat masyarakat Kabupaten Sidrap untuk memakai jasa PT. An-Nur Maarif melaksanakan ibadah haji dan umrah.

C. Rekomendasi

1. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* adalah suatu factor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja terhadap perusahaan, dan juga sebagai landasan terhadap pelaksanaan penyelenggara ibadah haji dan umrah pada umumnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada PT. An-Nur Maarif dimasa yang akan datang harus lebih meningkatkan mutu dari pelaksanaan GCG tersebut agar tingkat kepercayaan masyarakat atau calon jam'ah dapat meningkat dan pengembangan PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap akan lebih maju lagi.

2. Sosialisasi penerapan GCG sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan agar seluruh karyawan PT. An-Nur Maarif lebih mengenal dan memahami sehingga dapat melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewennag yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar menunjukkan Lembaga yang bersih, amanah dan terpercaya serta profesional.
3. Kepada Pimpinan PT. An-Nur MAarif Kabupaten Sidrap diharapkan senantiasa dapat mengontrol dan memotivasi para pegawai dalam membina anggotanya untuk dapat membangun karakter karyawan sesuai dengan budaya kinerja yang dilaksanakan. Pimpinan juga diharapkan sering evaluasi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* agar memiliki rasa tanggungjawab yang sesuai sistem tata kelola kelembagaan yang tumbuh besar dan semakin tumbuh rasa ingin memajukan *Good Corporate Governance* dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah dan Aktualisasi Syariah Modern*, Yogyakarta: Andi, 2011.

Abu Sin, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah Kajian Historis dan Kontemporer* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

Azwar, Safidin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Amin Widjaja Tunggal, Imam Sjahputra Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance*, Jakarta: PT. Prenhalindo, 2002.

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 6, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

Akhmad, Syakkroza, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, 2008.

AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Bangun Gunawan Dan Elly Halimatusadiah, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero)*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 2 No 1, 2014.

Daniri, Mas Ahmad, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Ray Indonesia, 2005.

Departemen Agama, Direktorat Jenderal, *Modul Pembelajaran Manasik Haji*, Jakarta, 2006.

Departemen Agama, Direktorat Jenderal, *Pola pembinaan Jamaah Haji*, Jakarta, 2007.

Departemen Agama, Direktorat Jenderal, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: 2009.

Direkrur Jenderal, *Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Jakarta: 2012.

Djojok Dwiridotjahjono Djojok, *Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia*, Jurnal: Adminidrasi Bisnis Vol No. 2, UPN Fisip Jawa Timur, 2009

- Fadillathun, Dila Dila, *Pengaruh Peran Komite Audit, Audit Internal, serta Dewan Pengawas Syariah Terhadap Good Corporate Governance Dan Kinerja Bank Syariah*, Tesis S2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah, 2015.
- Fitri, Nila Umailatul, *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Manajemen risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu*, skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, Tata Kelola Perusahaan* Jilid I. Edisi ke-3., Jakarta: Seri Tata Kelola Perusahaan, 2001.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi offset, 2004.
- Hastina Febriaty, Sri Endang Rahayu “Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Pasar Valuta Asing Pada Mata Kuliah Ekonomi Internasional 2 (Studi Mahasiswa Semester 5 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UMSU),” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 17, no. 2 (2017), h. 96
- Islami, Dipo Khairul, *Srategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji dan Umrah*, Jakarta: PT. Margani Suci, 2014.
- Indar Dewi Putri, *Penerapan Good Corporate Governance Di Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Al-Tsarwah Program Studi Ekonomi Syariah* Vol. 3 No.2 Desember 2020.
- Hendri Tanjung dan Didin Hafihuddin, *Manajemen Syariah dan Praktik*, Jakarata: Gema Insani Press, 2003.
- KNKG, *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*,” dalam *Republika*, 2012.
- Kementerian Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahan*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kasmir, *Etika Costumer Service*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Littlejohn, S.W dan K.A Foss, *Theories of Human Communication*, 8th Edition. Belmont, (USA: Thomson Learning Academic Resource Center, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPB, 2014.
- Mahmud, *Manajemen Haji Umrah, dan Wisata Religi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Meleong, Lecy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Meleong, Leczy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Melloeng, Lexy J.
- Metodologi Pendidikan Kualitas*, Bandung: Remaja Rosdakarya Cet. 26, 2009Rosdakarya, 2004.
- Nuzul, Zuriyah, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho, Rian. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Nurhasanah Siti, Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Persero, jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No 3 2010.
- Nalim, *Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam*, vol xx,2 oktober 2015, h. 10.
- Nugroho Arif, *Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Wujudkan Good Corporate Governance*, Jurnal Adminidrasi Negara, Volume 3, Nomor 1, 2014.
- Nurhasanah Siti, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Persero, jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No 3 2010.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.
- Putri, Litari Elisa “*Tanggungjawab Perusahaan Jasa Perjalanan (Travel Agency) Terhadap Konsumennya (Studi Pada PT. Arie Tours dan Travel Cabang Bandar Lamoung)*”, Skripsi sarjana Fakultas Hukum Bandar Lampung 2017
- Putra Asmoraaja, Dian Margi, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Angkasa Pura II (PERSERO)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar, 2016.
- Prastantio, Finsa Bagus, *Analisis Good Corporate Govenance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan* (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang), Jurnal Administrasi Bisnis 27 No. 2, 2015.
- Rifki Ismail dan Vietzhal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank, Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas dan Profesioanl*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Purnomo Setiady Akbar, Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* cet: Jakarta Bumi Aksara, 2008.
- Republik Indonesia PP Nomor Tahun 2021 Bab1 angka 8.

- Setiadi, Nugroho J, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Santrio, Daniel Nuri, *Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT XYZ*, Tesis S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2016.
- Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alferd Schutz: Studi Tentang Kontruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Social*. (Jurnal Ilmu Komunikasi Volume2 Nomor 1, Juni, 2005.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Volume: 7 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sadono, Sukirno, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Syaukani, Imam, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: CV. Prasati, 2009.
- Setiyono, Joko, *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam (pendekatan Ushul Fiqhi Teori Peningkatan Norma*, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Muqtasid vol 6 No 1, 2015.
- Subagyo Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suwandi dan Basrowa, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sinambela, Lijan P, *Reformasi Pelayanan Publik* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.XII, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sutopo, HB, *Metodelogi Peneltian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002.
- Samodra, Wibawa dkk. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sabir, Kartika, *Peran Kerja Sama Antara Travel An-Nur Maarif Pare-pare dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah*, Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Instutit Agama Islam Negeri Pare-Pare 2019.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Balaiurang, 2003.

- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Usman, Nurdin *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Universitas Lampung, “II Tinjauan Pustaka”, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id>, pada tanggal 01 Mei 2021 pukul 20.00 WITA
- Wahyuddin Halim dan A. Qadir Gassing HT, 2009. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cet. II, Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Wintara Putra, Vincentius, *Penerapan Good Corporate Pada Perusahaan Properti PT. Multi Royu Indonesia*, Jurnal Agora Vol. 2. 2. Surabaya Universitas Kristen Petra, 2014.
- Wahab, Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Wulandari, Novi Widiyanti, *Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Alternatif dalam Penerapan Good Corporate Governance*. Universitas Jember, 2009.
- Widjaja Amin, *Manajemen Syariah Pengantar*, Jakarta: PT Rima Cipta, 1995.
- Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Wulan Sari Novita, dkk, Penerapan Good Corporate Governance Di PT. Telkom Malang, Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang Vol 2, No. 4 659.
- Winarno, Budi. *Kebijakan publik: teori dan Proses* Yogyakarta: Media Presindo, 2008
- Yusanto, Muhammad Ismail, *Pengantar Manajemen Syariah*, Jakarta: khaerul Bayan, 2002.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Yoeti, Oka A. *Tours and Travel Marketing* Jakarta: Pradnya Paramita:2003.
- Zainuddin dan Mansyhuri, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)* Jakarta: Revika Aditama, 2008.
- Zarkasyi, Wahyudin, *Good Corporate Governance*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Wawancara Nara Sumber:

Arishandy, Ericy Pisco, “Devisi Haji dan Umrah PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap”, wawancara pada tanggal 18 Mei 2021.

Asma, Jamaah Haji dan Umrah PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap, wawancara pada tanggal 2 Juli 2021

Badria, Jamaah Haji dan Umrah PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap, wawancara pada tanggal 22 Mei 2021

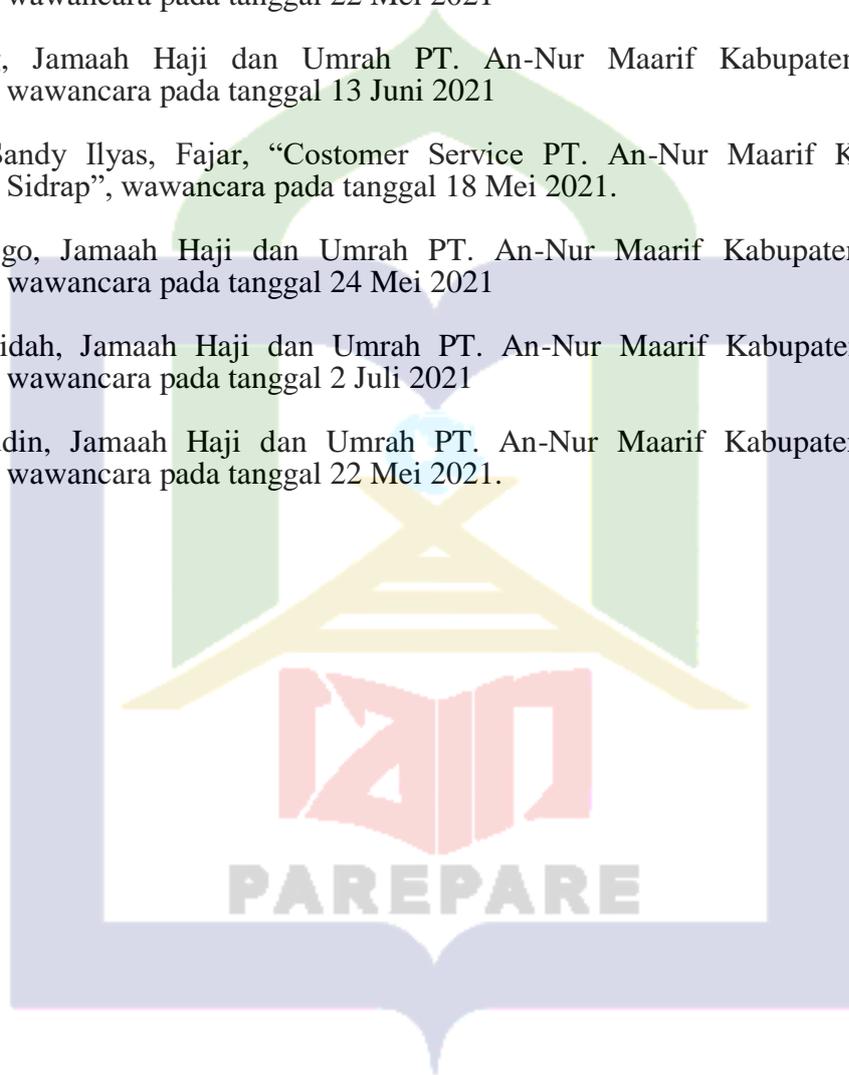
Enteng, Jamaah Haji dan Umrah PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap, wawancara pada tanggal 13 Juni 2021

Hari Sandy Ilyas, Fajar, “Costomer Service PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap”, wawancara pada tanggal 18 Mei 2021.

Lambogo, Jamaah Haji dan Umrah PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap, wawancara pada tanggal 24 Mei 2021

Nurmaidah, Jamaah Haji dan Umrah PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap, wawancara pada tanggal 2 Juli 2021

Wahyudin, Jamaah Haji dan Umrah PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap, wawancara pada tanggal 22 Mei 2021.





LAMPIRAN – LAMPIRAN



Pedoman Interview Pimpinan dan Karyawan PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap

Pertanyaan:

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana Profil An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana Visi dan Misi PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap?
4. Bagaimana Struktur Organisasi PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap?
5. Berapa Jumlah Jamaah Calon Jamaah Haji/Umroh PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap?
6. Bagaimana Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap?
7. Upaya apa saja yang dilakukan untuk membangun kepercayaan jamaah?
8. Bagaimana bentuk pelayanan yang anda tawarkan agar dapat memberikan kepuasan yang diharapkan oleh jamaah?
9. Bagaimana peningkatan setelah menerapkan *Good Corporate Governance*?
10. Metode promosi apa yang dilakukan sehingga dapat menarik jamaah?

**Pedoman Wawancara Jamaah PT. An-Nur Maarif
Kabupaten Sidrap**

Pertanyaan:

1. Bagaimana pelayanan yang ada di PT An-Nur Maarif?

Jawaban:

.....

.....

.....

2. Mengapa memilih PT. An-Nur Maarif sebagai travel haji/umroh bapak/ibu?

Jawaban:

.....

.....

.....

3. Apakah selama melaksanakan Haji/ Umroh dengan memakai jasa travel PT. An-Nur Maarif ada keluhan, kritik atau saran?

Jawaban:

.....

.....

.....



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis **Khaerunnisa**, lahir di Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada Tanggal 10 Februari 1995. Anak dari pasangan Bapak H. Jufri dan Ibu Hj. Sadaria. Penulis memiliki pasangan bernama Andi Kaharuddin dan seorang putri Andi Nur Arisha Kaharuddin. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat tinggal di Perumahan BTN Pondok Indah Soreang Blok B1 No 3, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SD 246 Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu dan pada Tahun 2010 lulus dari Madrasah Tsanawiyah Keppe (MTS), Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Suli (MAN) dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan Tinggi Strata 1 (S1) diselesaikan pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) di STAIN Parepare (2013-2018). Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister pada Program Pascasarjana IAIN Parepare dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah (2018-2021).

Karya penulis dalam bidang akademik salah satunya adalah karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul “*Eksistensi Oto Passangkin Terhadap Pola Hidup Paddaros Di Kabupaten Sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)*”, Penulis menyelesaikan studi di jenjang Magister dengan Tesis yang berjudul “*Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. An-Nur Maarif Di Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Syariah)*”.